

## GENDER DAN PEMBANGUNAN

Gender dan Pembangunan atau *Gender and Development* (GAD) adalah suatu pendekatan dalam pembangunan yang lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) kaum perempuan dan keadilan gender. Keberhasilan pendekatan GAD ini sangat tergantung dari sejauh mana tingkat pemahaman dan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan dan ketimpangan-ketimpangan gender, serta adanya komitmen yang tinggi dari berbagai unsure pembangunan termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat untuk menghapuskan praktik dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Buku ini membahas secara berurutan mengenai pentingnya memahami bagaimana Konstruksi Gender itu terjadi dan siapa pelaku-pelakunya, yang kemudian akan menggiring pada pemahaman mengenai Definisi Gender dan Istilah Gender lainnya, serta pengenalan mengenai Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender yang terjadi sebagai dampak konstruksi gender, dan mengenai Teori Gender. Selanjutnya, dibahas mengenai Latar Belakang dan Sejarah Pergerakan Perempuan, Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Perempuan, Pendekatan-pendekatan Perempuan dalam Pembangunan, dan Perkembangan Studi Perempuan dalam Pembangunan. Terakhir, dibahas mengenai bagaimana strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu melalui pemahaman dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Namun, sebelumnya harus memahami terlebih dahulu mengenai Permasalahan /Isu-Isu Gender dalam Pembangunan dan bagaimana melakukan analisis gender melalui beberapa Teknik Analisis Gender.

Dengan pembahasan yang rinci diharapkan buku ini akan sangat membantu dan bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen yang sedang atau yang berminat mempelajari tentang Gender dan Pembangunan. Pada akhirnya di harapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman, kesadaran baru untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender baik dalam kegiatan akademis maupun kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat.



PENERBIT UPT. MATARAM UNIVERSITY PRESS  
Jl. Pemuda Nomor 33 Telp. (0370) 633007, Mataram 83125  
Email : [upt.mataramuniversitypress@gmail.com](mailto:upt.mataramuniversitypress@gmail.com)  
Website : <http://uptpress.unram.ac.id/>



ISBN 978-623-7608-30-1

BUKU AJAR GENDER DAN PEMBANGUNAN

Dr. Ir. Hayati, M.Hum, Ir. Sri Supartiningsih, MP



BUKU AJAR

# GENDER DAN PEMBANGUNAN



Dr. Ir. Hayati, M. Hum  
Ir. Sri Supartiningsih, MP







*Buku Ajar*

.....

# **GENDER DAN PEMBANGUNAN**

.....

**Dr. Ir. Hayati, M. Hum  
Ir. Sri Supartiningsih, MP**



*Mataram University Press*

***Judul:***

Gender Dan Pembangunan

***Penulis:***

Dr. Ir. Hayati, M. Hum  
Ir. Sri Supartiningsih, MP

***Layout:***

Tim Mataram University Press

***Design Sampul:***

Tim Mataram University Press

***Design Isi:***

Tim Mataram University Press

**Penerbit:**

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789

e-mail: [upt.mataramuniversitypress@gmail.com](mailto:upt.mataramuniversitypress@gmail.com)

website: [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id).

**Cetakan Pertama**, November 2019

**Cetakan Ke-dua**, Mei 2020

**ISBN: 978-623-7608-30-1**

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

---

## **PRAKATA**

---

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rakhmat-NYA buku ajar dengan judul Gender dan Pembangunan ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pegangan mahasiswa strata sarjana yang mengambil mata kuliah pilihan Gender dan Pembangunan dengan jumlah kredit sebesar 2 SKS yang diasuh oleh Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Buku ini ditulis berdasarkan studi pustaka, analisis data sekunder, dan hasil-hasil penelitian, terdiri dari 10 bab dengan tujuan khusus penulisan buku adalah Konstruksi Gender, Definisi Gender, Istilah-Istilah Gender Lainnya dan Bentuk Ketidakadilan Gender, Teori Gender, Sejarah Pergerakan Perempuan, Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Perempuan, Pendekatan-pendekatan Perempuan dalam Pembangunan, Perkembangan Studi Perempuan dalam Pembangunan, Permasalahan/Isu-isu Gender dalam Pembangunan, Teknik Analisis Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan.

Penulisan Buku Ajar Gender dan Pembangunan ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang mempelajari Gender dan Pembangunan.

Mataram, 2020

Penulis.



---

## **RANCANGAN DAN TUJUAN PERKULIAHAN**

---

**Identitas mata kuliah:**

Nama mata kuliah : Gender dan Pembangunan

Besaran kredit sks : 2 (2/0)

Waktu : Semester Genap

Tempat : Prodi Agribisnis Fakultas

Pertanian Unram

Tujuan perkuliahan :

Setelah selesai menempuh mata kuliah ini mahasiswa akan dapat: memahami dan menjelaskan konstruksi jender, istilah gender lainnya dan bentuk ketidakadilan gender, teori dasar tentang jender, latar belakang sejarah dan politis perwujudan keadilan dan kesetaraan jender, perspektif feminis dalam menganalisis permasalahan perempuan, pendekatan utama perempuan dalam pembangunan dan perkembangan studi perempuan, isu-isu jender dalam pembangunan, analisis jender, pengarusutamaan gender dalam pembangunan; serta mahasiswa memiliki kesadaran, kepekaan dan ketanggapan gender, dan mampu menggunakan teknis analisis gender.



**Rancangan perkuliahan:**

Minggu ke	Topik/Sub Topik Bahasan
1-2	Konstruksi Gender
3	Definisi Gender, Istilah-Istilah Gender Lainnya dan Bentuk Ketidakadilan Gender
4	Teori Gender
5	Sejarah Pergerakan Perempuan
6-7	Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Perempuan
<b>UTS</b>	
8	Pendekatan-pendekatan Perempuan dalam Pembangunan
9	Perkembangan Studi Perempuan dalam Pembangunan
10	Permasalahan/isu-isu Gender dalam Pembangunan
11-13	Teknik Analisis Gender
14	Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
<b>UAS</b>	

---

---

## DAFTAR ISI

---

---

HALAMAN SAMPUL .....	i
PRAKATA .....	v
RANCANGAN DAN TUJUAN PERKULIAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR DIAGRAM .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I KONSTRUKSI GENDER .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian konstruksi gender .....	1
1.2 Stereotype dan Bagaimana Gender Dikonstruksikan dalam Masyarakat.....	5
1.3 Konstruksi dan Rekonstruksi Gender: Oleh Siapa? Bagaimana? Untuk Apa? .....	7
Rangkuman .....	12
Soal Latihan .....	13
Tugas Terstruktur.....	13
Daftar Pustaka.....	14
<b>BAB II DEFINISI GENDER, ISTILAH-ISTILAH GENDER LAINNYA, DAN BENTUK KETIDAKADILAN GENDER .....</b>	<b>15</b>
2.1 Definisi Gender.....	15
2.2 Istilah-istilah Gender Lainnya .....	16
2.3 Bentuk Ketidakadilan Gender .....	20

	Rangkuman .....	24
	Soal Latihan .....	25
	Tugas Terstruktur.....	26
	Daftar Pustaka.....	26
<b>BAB III</b>	<b>TEORI GENDER .....</b>	<b>27</b>
	3.1 Teori Nurture.....	27
	3.2 Teori Nature .....	28
	3.3 Teori Equilibrium .....	30
	Rangkuman .....	31
	Soal Latihan .....	31
	Tugas Terstruktur.....	32
	Daftar Pustaka.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>SEJARAH PERGERAKAN PEREMPUAN.....</b>	<b>33</b>
	1.1 Sejarah Perjuangan Perempuan di Tingkat Internasional .....	33
	1.2 Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia.....	37
	1.3 Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Perempuan di Tingkat Internasional.....	44
	1.4 Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia.....	45
	Rangkuman .....	48
	Soal Latihan .....	49
	Tugas Terstruktur.....	49
	Daftar Pustaka.....	50
<b>BAB V</b>	<b>PERSPEKTIF FEMINIS DALAM MENGANALISIS PERMASALAHAN PEREMPUAN .....</b>	<b>51</b>
	5.1 Feminisme Liberal .....	52
	5.2 Feminisme Marxis .....	54

5.3	Feminisme Radikal.....	58
5.4	Feminisme Psikoanalisis .....	63
5.5	Feminisme Sosialis .....	66
	Rangkuman .....	68
	Soal Latihan .....	69
	Tugas Terstruktur.....	69
	Daftar Pustaka.....	69

**BAB VI PENDEKATAN-PENDEKATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN ..... 71**

6.1	Pendekatan Kesejahteraan ( <i>Welfare Approach</i> ), 1950—1970 .....	72
6.2	Pendekatan Persamaan ( <i>Equity Approach</i> ), 1975-1985 .....	72
6.3	Pendekatan Anti Kemiskinan ( <i>Anti-Poverty Approach</i> ), 1970-an ke atas .....	73
6.4	Pendekatan Efisiensi ( <i>Efficiency Approach</i> ), pasca 1980 .....	74
6.5	Pendekatan Pemberdayaan ( <i>Empowerment Approach</i> ), 1975 ke atas terus diselaraskan hingga 1980, populer pasca 1990 .....	74
	Rangkuman .....	76
	Soal Latihan .....	77
	Tugas Terstruktur.....	77
	Daftar Pusataka.....	77

**BAB VII PERKEMBANGAN STUDI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN ..... 79**

7.1	Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender.....	79
7.2	Women in Development (WID) .....	82
7.3	Women and Development (WAD) .....	82
7.4	Gender dan Pembangunan/Gender and Development (GAD). .....	83

Rangkuman .....	87
Soal Latihan .....	88
Tugas Terstruktur.....	88
Daftar Pustaka.....	88
<b>BAB VIII PERMASALAHAN/ISU-ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN .....</b>	<b>89</b>
8.1 Permasalahan/Isu Gender dalam Pembangunan .....	89
8.2 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Pendidikan .....	92
8.3 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Politik .....	95
8.4 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Ekonomi.....	98
8.5 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Lingkungan .....	101
8.6 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Sosial Budaya.....	105
Rangkuman .....	107
Soal Latihan .....	108
Tugas Terstruktur.....	109
Daftar Pustaka.....	109
<b>BAB IX TEKNIK ANALISIS GENDER.....</b>	<b>111</b>
9.1 Model Harvard.....	111
9.2 Model Moser .....	118
9.3 Kerangka Pemampuan Perempuan (Sara H Longwe) .....	123
9.4 Model Gender Analysis Pathway (GAP) .....	125
Rangkuman .....	132
Soal Latihan .....	133
Tugas Terstruktur.....	133

	Daftar Pustaka.....	133
<b>BAB X</b>	<b>PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)</b>	
	<b>DALAM PEMBANGUNAN .....</b>	<b>135</b>
	10.1 Prinsip Penerapan PUG .....	136
	10.2 Cakupan dan Batasan Pengarusutamaan Gender .....	137
	10.3 Tujuan dan Sasaran Pengarusutamaan Gender .....	138
	10.4 Ruang Lingkup PUG.....	139
	10.5 Prosedur dan Langkah PUG .....	143
	10.6 Identifikasi Permasalahan Gender .....	146
	Rangkuman .....	147
	Soal Latihan .....	148
	Tugas Terstruktur.....	149
	Daftar Pustaka.....	149
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>



---

## **DAFTAR DIAGRAM**

---

---

Diagram 2:	Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin .....	4
------------	--	---





---

## **DAFTAR TABEL**

---

Tabel 1.	Perbedaan Gender dan Seks .....	2
Tabel 3.	Perbedaan Pendekatan WID/WAD dan GAD .....	85
Tabel 4.	Profil Kegiatan. ....	114
Tabel 5.	Profil Akses dan Kontrol .....	115
Tabel 6.	Analisis Keadaan dari Kasus KUD di Jawa Barat. ....	116
Tabel 7.	Perencanaan Proyek dari Kasus KUD di Jawa Barat. ....	117



---

# **BAB I**

## **KONSTRUKSI GENDER**

---

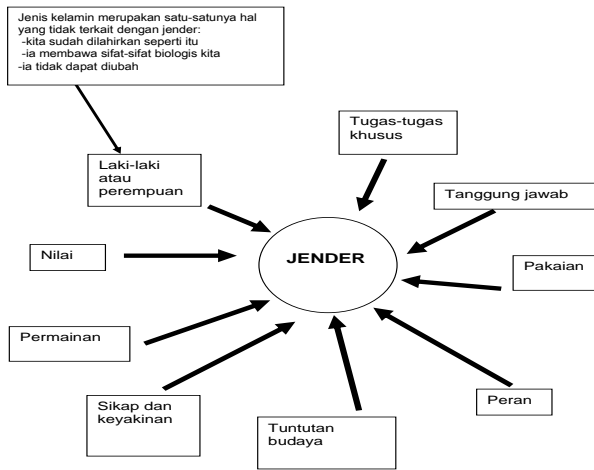
***Tujuan Instruksional:***

1. Mahasiswa dapat memahami dan membedakan konsep gender dan seks.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses dan pengertian konstruksi gender.
3. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis mengenai stereotype gender dan bagaimana gender dikonstruksikan dalam masyarakat.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan siapa pelaku konstruksi dan rekonstruksi gender, bagaimana caranya dan untuk apa gender dikonstruksikan dalam masyarakat.

### **1.1 Pengertian konstruksi gender**

Untuk memahami konstruksi gender, sebelumnya kita perlu memahami dengan benar tentang perbedaan antara gender dan seks. Penjelasan perbedaan gender dan seks seperti yang tertulis pada diagram dan tabel berikut.

Diagram 1. Hal-hal yang terkait dengan gender.



Tabel 1. Perbedaan Gender dan Seks

<b>Pengertian Gender</b>
<p>Gender mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hubungan perempuan dan laki-laki berdasarkan latar belakang sosial budaya dalam setiap masyarakat yang mempengaruhi bagaimana perempuan dan laki-laki diperlakukan, pembagian kerja menurut jenis kelamin, sikap terhadap yang lain dan terhadap diri sendiri, dan tingkah laku perempuan dan laki-laki.</li><li>• Perbedaan tingkah laku perempuan dan laki-laki, nilai social, dan aspirasi dalam konteks budaya masyarakat, sosial, ekonomi, dan lingkungan politik.</li><li>• Suatu perilaku social yang digambarkan oleh tiap masyarakat untuk perempuan dan laki-laki yang dipelajari dari lahir dan yang bisa berubah sejalan dengan waktu.</li><li>• Istilah perempuan dan laki-laki mengacu pada karakteristik biologis yang dibawa sejak lahir dan istilah feminine serta maskulin yang mengacu pada karakteristik gender yang diciptakan melalui proses sosialisasi.</li></ul>

**GENDER (SOSIAL) tidak sama dengan SEKS (BIOLOGI)**

**GENDER**

- Gender dikonstruksikan dan dideterminasi secara sosial di mana karakteristik dan peranan perempuan dan laki-laki diterima dalam masyarakat.
- Gender adalah tingkah laku yang dipelajari.
- Banyak stereotype gender yang umumnya dan secara salah diberikan kepada perempuan dan laki-laki.

**SEKS**

- Karakteristik fisik
- Karakteristik bawaan bersifat fungsional yang diberikan, diturunkan, permanent, dan tidak berubah.
- Karakteristik biologis alamiah.

Diagram 2: Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

<b>GENDER</b>	<b>VS</b>	<b>SEX/JENIS KELAMIN</b>
<p>Konstruksi/bentuk social</p> <p>↓</p> <p>Tidak dimiliki sejak lahir</p> <p>Lingkungan → ↓</p> <p>Bisa diubah</p> <p>Contoh: Perempuan dan laki-laki bisa mengasuh anak, mendidik anak, bekerja di sawah, dll.</p>		<p>Biologis</p> <p>↓</p> <p>Dimiliki sejak lahir</p> <p>↓</p> <p>Tidak bisa diubah</p> <p>Contoh: Hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, serta menstruasi.</p>
<p><b>Mengacu pada:</b></p> <p>Semua perilaku yang diterima secara budaya sebagai cara untuk menjadi seorang perempuan (femininitas) dan cara menjadi seorang laki-laki (maskulinitas)</p>		<p>Mengacu pada:</p> <p>Karakteristik biologis dan reproduktif. Kita dilahirkan sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan</p>
<p>Cara menjalani maskulinitas dan femininitas dipelajari; Semuanya merupakan peran sosial yang dinamis, berlangsung terus-menerus, terus berubah dan dapat diubah, direkonstruksikan dari waktu ke waktu melalui praktik sosial dan budaya.</p>		<p>Jenis kelamin seseorang merupakan aspek biologis</p>

Berdasarkan uraian pada diagram dan tabel di atas bahwa sesungguhnya gender dan seks adalah dua hal yang berbeda. Seks mengacu kepada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender

mengacu pada ciri-ciri yang ditentukan secara sosial dan budaya tentang makna menjadi maskulin atau feminin.

- Gender dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi antar individu dan antara individu dengan lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, sekolah, dan masyarakat.
- Pengalaman kita yang terkait dengan gender akan membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain—baik orang dewasa maupun anak-anak—dan cara kita memahami interaksi tersebut.
- Jenis kelamin seseorang tetap adanya.
- Sedangkan gender berubah dari waktu ke waktu. Perilaku maskulin dan feminin bukanlah ekspresi biologis alamiah, melainkan dipelajari. Perilaku gender dibentuk secara aktif dan dibentuk ulang (rekonstruksi) melalui praktik-praktik sosial, politik dan historis yang kompleks.

Dengan demikian, konstruksi sosial gender adalah suatu konsep yang menerangkan bahwa gender bukanlah karakteristik alamiah atau biologis dari perempuan dan laki-laki di dalam suatu kebudayaan, tetapi mengacu kepada cara menginterpretasikan sejumlah perbedaan biologis tertentu ke dalam harapan-harapan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi sosial masa kini yang terkait dengan laki-laki dan perempuan telah membentuk keyakinan tertentu tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

## **1.2 Stereotype dan Bagaimana Gender Dikonstruksikan dalam Masyarakat**

Seperti yang telah diuraikan di atas, secara umum pemahaman gender mengarah pada perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang di mana manusia beraktifitas. Perbedaan gender melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi, sebagaimana abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.



Matrik sederhana di bawah ini dapat menunjukkan perbedaan perempuan dan laki-laki secara gender yang mengakibatkan pemisahan-pemisahan sebagai berikut:

**Gender**

	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
Stereotiping	Feminin	Maskulin
Pembagian kerja secara gender	Kerja feminin	Kerja maskulin
Ruang lingkup	Domestik	Publik
Fungsi	Reproduksi	Produksi
Tanggung jawab	Nafkah tambahan	Nafkah utama

Pelabelan atau penandaan (stereotype) yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan. Salah satu jenis stereotype yang melahirkan ketidak-adilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah-tangga atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatannya di masyarakat bahkan di tingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan “perpanjangan” peran domestiknya.

Misalnya, karena perempuan dianggap tekun, sabar, teliti, dan penuh kasih sayang maka dia dianggap lebih pas bekerja sebagai guru TK/SD. Apabila seseorang laki-laki marah, ia dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standart penilaian terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan. Contoh:

- Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti kegiatan

politik, bisnis maupun birokrasi, menjadi kepala sekolah, pengawas, dan lainnya. Kesempatan perempuan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggipun menjadi lebih terbatas dari pada laki-laki karena adanya pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga atau “diambil orang”,

- Sementara label laki-laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan laki-laki selalu apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap “sambilan” sehingga kurang dihargai.

Jadi jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

### **1.3 Konstruksi dan Rekonstruksi Gender: Oleh Siapa? Bagaimana? Untuk Apa?**

Sekolah merupakan salah satu lembaga kunci yang berperan mengkonstruksikan gender. Ada banyak institusi lain yang berperan membentuk sikap sosial terhadap perilaku yang dipandang patut bagi perempuan dan laki-laki. Termasuk di antaranya adalah:

- a. Keluarga
- b. Media
- c. Agama
- d. Sekolah

### **a. Keluarga**

Keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap identitas gender anak-anak. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka. Semenjak dilahirkan, anak telah diperlakukan dengan cara-cara yang didasarkan pada gender seperti melalui cara mereka diasuh, melalui mainan, pakaian dan harapan-harapan (anak perempuan tidak bermain perang-perangan; anak laki-laki tidak bermain lompat tali). Anak-anak belajar tentang pentingnya peran gender pada usia kira-kira tiga tahun. Pengaruh yang terkait gender ini terus berlangsung hingga masa remaja dan dewasa.

Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat perlakuan berbeda dalam keluarga. Hal ini dipertahankan dengan adanya harapan-harapan yang berbeda terhadap perilaku mereka. Misalnya, karakteristik feminin seperti mengasuh, intuisi dan merawat tidak mendapat status yang sama dengan karakteristik maskulin seperti sifat-sifat berani/agresi, kekuatan dan kepercayaan diri.

Biasanya di dalam keluarga, anak laki-laki disosialisasikan agar sedapat mungkin tidak sama dengan anak perempuan. Tekanan terhadap perasaan-perasaan sayang yang dipandang bukan bagian dari citra seorang laki-laki. Bila anak laki-laki diajar untuk menahan emosi mereka dan anak perempuan dijauhkan dari peluang untuk menjadi kuat, percaya diri dan tegas, maka proses sosialisasi hanya akan menanamkan konsep gender yang sempit.

### **b. Media**

Media merepresentasikan perempuan dan laki-laki dengan cara yang menguatkan dan menegaskan pelabelan seksis. Peran media sangat ampuh dalam membentuk gagasan tentang perilaku berbasis gender. Citra perempuan adalah kurus, cantik dan muda, sedangkan citra laki-laki adalah jantan, muda dan kuat. Perempuan cenderung dipandang pasif dan lembut,

berbeda dengan laki-laki yang aktif dan agresif. Seperti halnya lembaga sosial yang lain, media juga dapat ditantang.

### **c. Agama**

Agama merupakan lembaga sosial yang sangat kuat. Seperti halnya lembaga sosial lain yang sudah dibahas, agama adalah pemain dan pembentuk gender dan relasi gender yang ampuh. Pandangan-pandangan pemuka agama yang didasarkan pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya memainkan peranan gender yang 'pantas', sehingga persoalan kepemimpinan perempuan telah menimbulkan kontroversi beberapa tahun belakangan ini.

### **d. Pemerintah**

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tanggap gender dan perilaku pimpinan atau pejabat pemerintah yang tidak sadar, peka dan tanggap gender seringkali melestarikan stereotype gender yang merugikan perempuan.

### **e. Sekolah**

Sebagai pendidik kita perlu menyadari implikasi negatif dan sempit dari konstruksi gender dalam kehidupan murid. Misalnya, akibat diferensiasi/diskriminasi gender dalam pendidikan murid laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, hal ini akan menuntun kepada ketidaksetaraan prestasi anak perempuan dan anak laki-laki.

Para pendidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki melalui praktik mengajar dan kurikulum tidak membatasi pilihan hidup serta jangkauan perilaku yang dapat diakses oleh anak perempuan dan anak laki-laki, melalui stereotype/pelabelan gender.

## **f. Bahasa**

Bahasa bukanlah institusi yang mengkonstruksikan gender, namun ia memainkan peranan penting dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki.

Bahasa adalah sarana yang membuat kita mengerti dunia dan realitas sosial. Ia bukan sekadar sarana untuk komunikasi; Ia membentuk pola pikir kita tentang relasi antara anak perempuan dan anak laki-laki, serta antara perempuan dan laki-laki dewasa.

Ada berbagai macam aliran/gaya cerita, buku, TV, puisi, lagu, film, iklan dan percakapan. Cerita-cerita ini menawarkan kepada kita, cara-cara untuk memahami dan pada saat yang sama membentuk hidup kita. Ia menuntun pemahaman kita tentang cara menjadi manusia, perempuan dan laki-laki, dan hubungan yang ada di antara keduanya (jenis manusia). Pengaruh dari semua cerita ini bersama-sama sangatlah kuat dan turut menentukan kebutuhan serta hasrat manusiawi kita, termasuk kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan hasrat untuk bahagia. Anak perempuan dan anak laki-laki dengan segera akan belajar bahwa ada cara-cara yang patut menurut gender guna memenuhi kebutuhan dan hasrat ini.

Hakikat praktik-praktik bahasa terkait gender telah tampak melalui sejumlah penelitian, dan temuan-temuannya antara lain:

- Sempitnya pembentukan karakter, penggambaran yang tidak setara tentang karakter perempuan dan laki-laki serta dari cerita tentang pekerjaan perempuan dan laki-laki dalam bahan bacaan di sekolah
- Ada cukup banyak perbedaan dalam cerita yang ditulis oleh murid laki-laki dan perempuan, termasuk bentuk karakter, latar dan alur cerita, dan tingkat kegiatan; misalnya, lebih banyak kegiatan dan lebih luas pekerjaan diberikan bagi karakter/tokoh laki-laki

- Perempuan seringkali ditokohkan sebagai orang yang membantu, menyayangi dan mengasuh, sementara laki-laki seringkali digambarkan sebagai tokoh yang agresif secara fisik dan verbal
- Perbedaan-perbedaan yang jelas dalam pilihan bacaan anak perempuan dan anak laki-laki
- Akses yang tidak setara terhadap ruang bahasa; Anak laki-laki berbicara lebih banyak di kelas, dalam pertemuan dan acara bincang-bincang di televisi.

Pemahaman dan pengalaman anak-anak yang terkait gender, dipengaruhi oleh praktik-praktik bahasa yang dijalani setiap hari. Para pendidik perlu menyadari hakikat praktik bahasa yang terkait gender dan menyadari ciri gender dalam bacaan, tulisan dan pembicaraan di sekolah mereka.

### **Pelabelan (stereotype) murid-murid**

Sekolah merupakan institusi yang turut menguatkan berbagai perilaku anak laki-laki dan anak perempuan. Guru merefleksikan praktik ini sebagai penegasan bagi anak laki-laki dan perempuan, misalnya guru dapat melihat hal yang bertentangan seperti tenang dan ribut, aktif dan pasif, dominan dan patuh. Para guru cenderung memiliki persepsi stereotipikal tentang perilaku dan karakter anak perempuan dan anak laki-laki. Intinya adalah, harapan-harapan ini dapat mempengaruhi perilaku dan mengukuhkan cara-cara bertindak yang stereotipikal. Hal ini termasuk persepsi guru bahwa anak perempuan tidak pandai matematika dan karena itu tidak membantu mereka.

### **Guru sebagai teladan**

Guru berperan penting dan merupakan teladan yang sangat berpengaruh. Murid-murid belajar banyak sekali dengan mengamati interaksi antar guru dan dengan orang dewasa lain. Para guru lebih dari sekadar penerus pengetahuan. Mereka adalah konstruktor dan rekonstruktor gender yang aktif. Melalui interaksinya, mereka menyampaikan pesan-pesan tentang cara

mereka menangani gender dalam kehidupan mereka sendiri. Peran mereka untuk secara aktif mengangkat persoalan-persoalan tentang pembatasan hakikat gender bagi anak laki-laki dan anak perempuan merupakan hal yang amat penting.

Untuk apa gender dikonstruksikan? Dominasi, kekuasaan, penempatan pada tingkat sosial yang lebih rendah. Gender merupakan persoalan dominasi, bukan perbedaan.

### **Rangkuman**

1. Seks mengacu kepada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada ciri-ciri yang ditentukan secara sosial dan budaya tentang makna menjadi maskulin atau feminin.
2. Konstruksi sosial gender adalah suatu konsep yang menerangkan bahwa gender bukanlah karakteristik alamiah atau biologis dari perempuan dan laki-laki di dalam suatu kebudayaan, tetapi mengacu kepada cara menginterpretasikan sejumlah perbedaan biologis tertentu ke dalam harapan-harapan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi sosial masa kini yang terkait dengan laki-laki dan perempuan telah membentuk keyakinan tertentu tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.
3. Gender perlu dipersoalkan karena perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

4. Sekolah merupakan salah satu lembaga kunci yang berperan mengkonstruksikan gender. Institusi lain yang berperan membentuk sikap sosial terhadap perilaku yang dipandang patut bagi perempuan dan laki-laki, adalah: keluarga, media, agama, pemerintah.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan konsep gender dan seks.
2. Jelaskan pengertian konstruksi gender dan jelaskan bagaimana gender dikonstruksikan dalam masyarakat.
3. Jelaskan akibat atau pemisahan-pemisahan yang terjadi dari perbedaan perempuan dan laki-laki secara gender.
4. Sebutkan pelaku konstruksi gender dan jelaskan bagaimana lembaga-lembaga pelaku konstruksi gender dapat mere-konstruksi gender dalam masyarakat.

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah laporan mengenai pengalaman dan pengamatan Anda bagaimana keluarga, sekolah dan media merekonstruksi gender dalam masyarakat.



### **Daftar Pustaka**

- NTTPEP. 2007. Panduan Pelatihan Keadilan Gender. NTTPEP-AusAID, Kabupaten Ende. Ende NTT
- Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suryadi, Ace.2004. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Genesindo. Jakarta.
- Smithyman, Patricia. 2002. Gender Equity. Primary and Secondary Teacher Education Project Australian Agency for International Development (AusAID) GRM International.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

---

## **BAB II**

### **DEFINISI GENDER, ISTILAH-ISTILAH GENDER LAINNYA, DAN BENTUK KETIDAKADILAN GENDER**

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang sama dan menjelaskan mengenai definisi gender.
2. Mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang sama dan menjelaskan mengenai definisi keadilan gender, kesetaraan gender, bias gender, kesenjangan gender, permasalahan/isyu gender, pengarusutamaan gender, relasi gender, sadar gender, peka gender, tanggap gender.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat, yaitu marjinalisasi, sub-ordinasi, pandangan stereotipe, kekerasan, beban kerja.

#### **2.1 Definisi Gender**

Gender mengacu kepada perilaku dan sikap yang secara budaya diterima sebagai cara menjadi seorang perempuan (feminitas) dan cara menjadi seorang laki-laki (maskulinitas). Apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan, ditentukan oleh sifat biologisnya. Hal ini berbeda dengan menjadi seorang lelaki atau menjadi perempuan. Cara orang menjalani maskulinitas dan feminitas merupakan hal yang dipelajari. Maskulinitas dan feminitas dikembangkan sewaktu kita bertumbuh,

dan perilaku serta sikap kita dipengaruhi oleh aturan sosial dan budaya dalam masyarakat. Kita belajar dari masyarakat tentang cara bertindak, berpikir, dan hidup sebagai laki-laki atau perempuan. Inilah peran sosial yang dikuatkan, dipertahankan, dan direkonstruksikan dari waktu ke waktu melalui praktik sosial dan budaya. Peran seperti itu berbeda dalam setiap budaya dan kelas sosial serta berubah dari waktu ke waktu.

Jadi gender adalah perbedaan-perbedaan peran, sikap, perilaku, nilai antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh sosial budaya yang keberadaannya berbeda menurut tempat, kultur bangsa, peradaban serta dapat berubah dari waktu ke waktu

## **2.2 Istilah-istilah Gender Lainnya**

Pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah gender lainnya sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam melakukan upaya perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Berikut adalah definisi dari istilah-istilah gender lainnya.

### **1) Keadilan Gender**

Keadilan (*equity*) berarti hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias. Dalam pertukaran sosial, keadilan terjadi bila orang-orang yang telah memberikan kontribusi terbesar menerima imbalan yang relatif besar pula, sedangkan orang-orang yang memberikan kontribusi kecil menerima imbalan yang relatif, dan seterusnya. Dalam konteks sosial, keadilan juga melibatkan kesadaran atau prinsip-prinsip keadilan yang alamiah. Hal ini dapat menyebabkan orang mendapat perlakuan yang berbeda bila hal ini dipandang adil atau pantas.

Keadilan tidak akan tercapai bila ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender berarti memperlakukan jenis kelamin secara berbeda sehingga salah satu jenis kelamin dipandang lebih rendah dari jenis kelamin lainnya. Diskriminasi gender dapat

mengakibatkan ketidakseimbangan perihal manfaat ekonomi dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang adil diberikan baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengejar berbagai minat, karir, gaya hidup dan kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki sehingga hasil-hasil yang adil dapat dicapai oleh semua.

Memahami keadilan gender akan membuat orang dapat mengenali dan mengatasi tantangan serta ketidakadilan yang mungkin dihasilkan dari ketidapkahaman terhadap konstruksi gender.

Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk memberikan peluang yang setara, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dengan cara ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat belajar dan ikut ambil bagian dalam berbagai minat, subjek, karir dan gaya hidup. Keadilan gender juga berarti membuat ketentuan khusus dan memenuhi kebutuhan khusus dari beberapa murid (yang membutuhkannya). Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan bakatnya.

## 2) Kesetaraan Gender

Kesetaraan berbeda dengan keadilan. Kesetaraan berarti keadaan yang memungkinkan setiap orang menerima perlakuan yang sama, terlepas dari siapa atau di mana ia berada. Kadang-kadang kita perlu memberikan dukungan ekstra bagi perempuan atau laki-laki jika mereka mengalami diskriminasi.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam

kegiatan pendidikan, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut.

### 3) Bias Gender

Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.

### 4) Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Ketidakseimbangan perempuan dan laki-laki ini, misalnya terjadi dalam pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, akses dan penguasaan atas sumber daya kehidupan.

### 5) Permasalahan/Isu Gender

Permasalahan/isu gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan gender atau ketimpangan gender. Di antara permasalahan ini adalah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan control atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan.

### 6) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming* adalah strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, di mana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### 7) Relasi Gender

Relasi gender (*gender relation*) adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerja sama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain. Hubungan gender setara (*equal gender relation*),

jika posisi social laki-laki dan perempuan setara. Hubungan gender tidak setara (*unequal gender relation*), jika posisi social laki-laki tidak setara dengan posisi social perempuan. Salah satunya berada pada posisi subordinate.

#### 8) Kesadaran Gender

Kesadaran gender (*gender awareness*) adalah kesadaran yang seyogyanya dimiliki oleh anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan) bahwa peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan diperoleh secara alamiah melalui kelahiran tetapi melalui proses belajar yang justru telah menyebabkan status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan hubungan gender yang tidak setara yang merugikan kaum perempuan.

#### 9) Peka Gender

Peka/sensitif gender (*gender sensitivity*) adalah sikap dan perilaku yang seyogyanya dipunyai oleh tiap anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang didasari oleh adanya kesadaran gender dan karenanya peka terhadap adanya perbedaan peran dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan yang justru merugikan kaum perempuan.

#### 10) Tanggap Gender.

Tanggap gender (*gender responsif*) adalah perspektif para perumus kebijakan dan pelaksana pembangunan yang telah memiliki kesadaran gender dan kepekaan terhadap ketimpangan gender dan karenanya berupaya untuk mewujudkan kemitraan yang setara serta pemberdayaan (*empowerment*) bagi perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunannya.

### **2.3 Bentuk Ketidakadilan Gender**

Berikut adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dapat dijumpai di lingkungan masyarakat.

1) Marjinalisasi.

Proses marjinalisasi (pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halamannya, eksploitasi dan sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dan beberapa jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Sebaliknya, banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

Contoh-contoh marjinalisasi :

- Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru yang dikerjakan laki-laki.
- Pemotongan padi dengan peralatan mesin yang membutuhkan tenaga dan keterampilan laki-laki, menggantikan tangan-tangan perempuan dengan ani-ani.
- Usaha konveksi yang lebih suka menyerap tenaga perempuan
- Peluang menjadi pembantu rumah tangga lebih banyak diberikan kepada perempuan.

Demikian juga banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak”, “sekretaris”, atau “perawat” dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan.

## 2) Subordinasi.

Sub ordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub ordinat. Kenyataan memperlihatkan pula bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan diberbagai kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki merasa tertekan. Menjadi bawahan seorang perempuan yang pada pola pikirnya merupakan makhluk lemah dan lebih rendah membuat laki-laki merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki.

## 3) Pandangan Stereotipe.

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotype yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender



karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah-tangga atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika ia berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatannya dimasyarakat bahkan di tingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan “perpanjangan” pran domestiknya. Misalnya, karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja di bagian penjualan. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standard penilaian terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda namun standard nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

Contoh :

- Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- Sementara label laki-laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap “sambilan” sehingga kurang dihargai.
- Keramah tamahan laki-laki dianggap merayu dan kera mah tamahan perempuan dinilai genit.

#### 4) Kekerasan.

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata “kekerasan” yang merupakan terjemahan dari “*violence*” artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan

atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya.

Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individu seperti didalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum dan juga di dalam masyarakat. Misalnya :

- Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- Isteri menghina/mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami

#### 5) Beban Kerja

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan.

Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90persen dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Contohnya, seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya diatas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci pring-piring yang kotor. Seorang Bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan yang sudah tersedia, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang bekas mereka pakai. Apabila yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya. Beban kerja semacam itu juga menimpa laki-laki, misalnya saja sepulang dari kantor pada petang hari, pada malam harinya ia masih harus siskamling untuk memenuhi tugasnya sebagai warga masyarakat setempat.

## Rangkuman

1. Gender adalah perbedaan-perbedaan peran, sikap, perilaku, nilai antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh sosial budaya yang keberadaannya berbeda menurut tempat, kultur bangsa, peradaban serta dapat berubah dari waktu ke waktu.
2. Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.
3. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia.
4. Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.
5. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
6. Permasalahan/isu gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan gender
7. Pengarusutamaan gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming* adalah strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
8. Relasi gender (*gender relation*) adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerja sama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain.
9. Kesadaran gender (*gender awareness*) adalah kesadaran masyarakat bahwa peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dibentuk melalui proses belajar.

10. Peka/sensitif gender (*gender sensitivity*) adalah sikap dan perilaku masyarakat yang didasari oleh adanya kesadaran gender.
11. Tanggap gender (*gender responsif*) adalah perspektif para perumus kebijakan dan pelaksana pembangunan yang telah memiliki kesadaran gender dan kepekaan terhadap ketimpangan gender.
12. Proses marginalisasi (pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halamannya, eksploitasi dan sebagainya.
13. Sub ordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.
14. Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan.
15. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.
16. Beban kerja adalah kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan pengertian gender.
2. Jelaskan pengertian keadilan gender dan kesetaraan gender, dan jelaskan mengapa keadilan gender adalah yang utama untuk dicapai terlebih dahulu.
3. Jelaskan mengapa setiap anggota masyarakat harus memiliki perilaku yang sadar, peka dan tanggap gender?
4. Sebutkan contoh-contoh isu gender dalam pembangunan.

5. Jelaskan dan berikan contoh mengenai hubungan gender yang mana yang ideal untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
6. Sebutkan dan jelaskan mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat.

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah check list (daftar periksa) perilaku Anda yang responsif gender sebagai anggota masyarakat dan sebagai mahasiswa.

### **Daftar Pustaka**

- NTTPEP. 2007. Panduan Pelatihan Keadilan Gender. NTTPEP-AusAID, Kabupaten Ende. Ende NTT
- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.
- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia. UNFPA. Jakarta.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Puspitawati, Herien. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. IPB Press. Bogor.
- Wallce, Tina dan March, Candida. 1991. Changing Perception. Oxfam.Oxford.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

---

## **BAB III**

# **TEORI GENDER**

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teori Nutrure.
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teori Nature.
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teori Equilibrium.

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori, yaitu teori nurture, dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari 2 konsep teori yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium. Secara rinci teori-teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **3.1 Teori Nurture**

Menurut teori Nurture perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas, laki-laki

diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai proletar.

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (*semeness*) dengan konsep 50 : 50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan social konflik, yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran *Karl Marx* (1818 – 1883) dan *Machieawelli* (1469 – 1527) dilanjutkan oleh *David Locwood* (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika.

*Randall Collins* (1987) beranggapan keluarga adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. *Margrit Eichlen* beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender.

Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) dan perempuan sebagai kaum tertindas (proletar). Bagi kaum proletar tidak ada pilihan kecuali dengan perjuangan menyingkirkan penindas demi untuk mencapai kebebasan dan persamaan. Karena itu aliran nurture melahirkan paham konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, militer, menejer, menteri, gubernur, pilot, dan pimpinan partaii polik.

### **3.2 Teori Nature**

Menurut teori nature, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat

dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori nurture di atas, lalu beralih ke teori nature. Pendekatan nurture dirasakan tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologi diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (instinct). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division of labor*) begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami isteri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan. Tidak mungkin satu kapal dikomandani oleh dua nakoda. Paham ini diajarkan oleh *Socrates* dan *Plato*, yang kemudian diperbaharui oleh *August Comte* (1798-1857), *Emile Durkheim* (1858-1917) dan *Herbert Spencer* (1820-1930) yang mengatakan bahwa kehidupan kebersamaan didasari oleh pembagian kerja dan tanggung jawab.

*Talcott Parsons* (1902-1979) dan *Parsons & Bales* berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling bantu membantu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui "Pola Pendidikan" dan pengasuhan anak dalam keluarga.



Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara suami isteri dalam keluarga atau antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

### **3.3 Teori Equilibrium**

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia.

Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

Penting sekali untuk memahami perbedaan antara beberapa teori yang membawa kita sampai pada pemahaman terkini tentang konstruksi sosial gender. Jika kita mau agar pendidikan gender di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat sekolah berjalan dengan efektif, maka semua pendidik dan guru harus

betul-betul memahami konstruksi gender dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka secara pribadi maupun profesional.

### **Rangkuman**

Pembahasan mengenai gender tidak dapat dilepaskan dari pandangan/teori yang mendasari pembahasan gender. Secara umum dikenal 2 teori mengenai gender yaitu:

1. Teori Nurture, menyebutkan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga meningkatkan peran dan tugas yang berbeda.
2. Teori Nature, menyebutkan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, yang memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda.
3. Dari kedua teori tersebut dapat dikembangkan teori ketiga yang bisa disebut teori equilibrium (keseimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara teori gender yaitu teori nurture, teori nature, dan teori equilibrium.
2. Mengapa diperlukan pemahaman yang baik mengenai perbedaan antara beberapa teori gender tersebut..
3. Jelaskan mengapa teori equilibrium ini diperlukan.

### **Tugas Terstruktur**

Buat laporan mengenai hasil pengamatan Anda mengenai pembagian kerja berdasarkan gender yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat lingkungan Anda. Jelaskan apa landasan teori gender yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda itu, dan jelaskan pula apa pendapat Anda mengenai kondisi yang ideal dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal itu.

### **Daftar Pustaka**

- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.  
2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender  
Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.
- Suryadi, Ace.2004. Kesetaraan gender dalam pendidikan.  
Genesindo. Jakarta.
- NTTPEP. 2007. Panduan Pelatihan Keadilan Gender.  
NTTPEP-AusAID, Kabupaten Ende. Ende NTT

---

## **BAB IV**

# SEJARAH PERGERAKAN PEREMPUAN

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Menjelaskan tentang sejarah perjuangan perempuan di tingkat Internasional dalam rangka pemahaman tentang gender.
2. Menjelaskan tentang sejarah perjuangan perempuan di Indonesia
3. Mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

### **1.1 Sejarah Perjuangan Perempuan di Tingkat Internasional**

Perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia PBB (1948). Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di dunia internasional tidak terkecuali di Indonesia.

Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sedang menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia, terutama setelah berakhirnya perang dingin antar Blok Timur dan Blok Barat. Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan **keamanan dan kestabilan (*security*)** menuju pendekatan **kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*)** atau dari pendekatan **produksi (*production centered development*)** ke pendekatan **kemanusiaan**

**(people centered development)** dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan memerlukan kehadiran dan kerjasama satu sama lain. Keterpaduan antara dua bagian, tidak sama dengan kemitraan dan keharmonisan, adalah prinsip dasar dari sesuatu yang diciptakan berpasangan.

Masalah gender pada dasarnya adalah menganut prinsip kemitraan dan keharmonisan, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan **diskriminasi, marginalisasi, sub ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan** dari satu pihak (laki-laki) ke pihak lain (perempuan) baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Perlakuan yang merupakan hasil akumulasi dan ekses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat tanpa ada klarifikasi yang rasional, akan mengakibatkan seluruh kesalahan sering ditimpakan pada kaum laki-laki yang telah mendominasi dan memarginalkan kaum perempuan tanpa menjelaskan mengapa budaya tersebut terjadi. Untuk itu, informasi tentang perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki menjadi cukup relevan dipelajari.

Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep **emansipasi (kesamaan)** antara perempuan dan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an. Pada tanggal 12 Juli 1963 timbul gerakan globalnya dipelopori gerakan kaum perempuan yang berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui badan ekonomi sosial PBB (**ECOSOC**) No. 861 F (XXVI) dan diakomodasi pemerintah Indonesia pada tahun 1968. Untuk mewadahi perjuangan tersebut dibentuk **Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia** dengan SK Menteri Negara Kesra No. 34/KPTS/Kesra/1968. Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan **World Conference International Year of Women-PBB** yang menghasilkan deklarasi kesamaan wanita antara perempuan dan laki-laki dalam hal :

- 1) Pendidikan dan pekerjaan,
- 2) Memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan
- 3) Memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan,
- 4) Tersedia data dan informasi partisipasi perempuan
- 5) Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin

Untuk itu dikembangkan berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (Women Empowerment Programs). Guna mewadahi aktifitas tersebut, maka diperkenalkan tema **perempuan dalam pembangunan (Women in Development)** yang disingkat dengan WID, yang bermaksud mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan.

Di Indonesia dibentuk paguyuban antara lain kelompok UPPKAS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang beranggotakan khusus perempuan yang bergerak di bidang ekonomi produktif sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 1980 di Kopenhagen dilakukan *World Conference UN Mid Decade of Women*, yang mengesahkan tentang *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Cedaw)*, merupakan konvensi tentang peniadaan/penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta diratifikasi oleh Pemerintah RI pada tahun 1984. Pada pertemuan itu dari Indonesia dihadiri oleh Menteri Muda UPW. Tahun 1985 di Nairobi, diadakan *World Conference on Result on Ten Years Women Movement*, yang menghasilkan *The Nairobi Looking Forward Strategies for the Advancement of Women* yang bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sejak itu muncul konsep-konsep dan penelitian-penelitian yang menekankan pada kesetaraan

perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dan perdamaian.

PBB pada tahun 1985 membentuk satu badan yang disingkat **UNIFEM (the United Nations Fund for Women)** untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kerjasama dengan kaum laki-laki yang dilakukan 10 tahun (antara 1970-1980) tidak banyak menampilkan hasil yang signifikan. Pendekatan bertentangan (dikotomis) dirasakan kurang membawa hasil yang memadai bahkan timbul sinistis (male backlash) dari kaum laki-laki terhadap perjuangan tersebut. Berdasarkan berbagai studi maka tema **WID (Women in Development)** atau **perempuan dalam pembangunan** dirubah menjadi **perempuan dan pembangunan**. Kata **dalam** diganti dengan **dan** memberi makna bahwa kualitas (mutu) kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas (jumlah).

Pada tahun 1990 di Vienna diselenggarakan *the 3 th Commission on the Status of Women* dilakukan analisis terhadap konsep pemberdayaan perempuan tanpa terlibat kaum laki-laki nampaknya juga kurang membawa hasil seperti yang diharapkan. Dari studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik Oleh karena itu dipergunakan pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan **Gender and Development (GAD)**, suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau sebaliknya. Pandangan itu terus diperdebatkan dalam *the international Conference on Population and Development (ICPD)* di Cairo, 1994 dan *the 4 th World Conference on Women*, Beijing 1995. Dari konferensi tersebut disepakati berbagai komitmen operasional tentang perbaikan terhadap status dan peranan

perempuan dalam pembangunan mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan sampai pada menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian terjadi perubahan konsep yang sangat mendasar yaitu dari pembahasan pada masalah **fisik biologi (biological sphere)** ke masalah **sosial budaya (socio-cultural sphere)**.

## 1.2 Sejarah Perjuangan Perempuan di Indonesia

Secara nasional di Indonesia, pergerakan kaum perempuan mulai diilhami oleh perjuangan RA. Kartini yang ingin terbebas dari belenggu budaya kraton (Jawa), meskipun secara diam-diam dan tidak terbuka. Gagasan itu dicerna oleh kaum perempuan yang aktif dalam gerakan *Kebangkitan Nasional 1908*. Gejolak rasa nasionalisme itu dibulatkan dalam bentuk *Sumpah Pemuda* tahun 1928, yang ditindak lanjuti oleh *Kongres Perempuan Indonesia* tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia. Pada waktu itu resolusi penting yang dideklarasikan adalah **“tuntutan terhadap upaya peningkatan kondisi perempuan dan persyaratan perkawinan”** karena pada saat itu nilai yang harus dipenuhi oleh seorang isteri adalah mampu menangani kehidupan rumah tangga dan keluarga yang baik. Jadi setiap upaya untuk meningkatkan **kondisi perempuan** harus meningkatkan pula kapasitasnya dalam tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga, sehingga Kongres Perempuan tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Yang dimaksud dengan tuntutan peningkatan **kondisi perempuan** saat itu meliputi tuntutan hak berpolitik, hak pendidikan perempuan, nasib yatim piatu dan janda, pekerja anak, perkawinan anak-anak, perempuan buruh dan kejahatan kawin paksa. Bahkan isu-isu kesetaraan, keadilan dan penindasan sudah mulai mereka kemukakan serta masih relevan sampai saat ini, bila dikaitkan dengan isu kesetaraan dan keadilan gender dan gender mainstreaming (Propenas 2001 – 2004).



Tuntutan persamaan hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi relevan karena sejak dulu perempuan telah membuktikan kemampuannya, seperti dalam masa perjuangan kemerdekaan, peran perempuan sangat penting baik secara fisik maupun moril yaitu bertugas di garis belakang (penyediaan logistik, perawatan korban dan penghubung antar kelompok pejuang). Untuk itu dikenal nama pejuang perempuan di medan perang seperti nama *Cut Nyak Dien* dan *Martha Tiahahu*. Di bidang pendidikan terdapat nama *Rasuna Said*, *Dewi Sartika* dan sebagainya. Di bidang politik terdapat nama seperti *SK. Trimurti*, *Ny. Supeni*, *Ny. Fatmawati* dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 1930 untuk menghimpun potensi kaum perempuan telah diselenggarakan *Kongres Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) ke 2* di mana perdagangan perempuan dan anak menjadi isu besar yang ditanggapi serius dengan mendirikan Perhimpunan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan penduduk tani dan kondisi kerja yang amat buruk bagi perempuan buruh pada umumnya.

Gerakan perempuan terus berlanjut untuk memperbaiki keadaan dan mengubah tatanan yang menyebabkan perempuan tertindas dan terbelakang. Kemudian di tahun 1950 didirikan organisasi *Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)* dan dilanjutkan dengan pembentukan BKOW (Badan Kontak Organisasi Wanita), begitu pula di dalam organisasi sosial keagamaan seperti Muslimat dan Fatayat (NU), Wanita Khatolik, Aisyiah (Muhammadiyah), Wanita Marhaen dan sebagainya. Namun sejak 1 Oktober 1965 sejarah panjang ini terputus, organisasi perempuan seolah membisu, keberpihakan kepada kaum lemah menguap begitu saja, karena takut dicap sebagai “organisasi kiri” yang diidentifikasi dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang “liar” dan “tak bermoral”.

Melihat dinamika gerakan perempuan Indonesia dalam percaturan kebangkitan bangsa, mereka bukanlah mahluk yang pasif, tapi agen perubahan dan agen

pembuka yang dilandasi oleh gerakan nasionalisme yang tidak kalah keras dengan kaum laki-laki.

1) Gerakan perempuan masa Orde Baru

Dengan dibentuknya **Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI)** tahun 1967, maka wadah perjuangan kaum perempuan semakin dikongritkan. Pada tahun 1975 dalam Kabinet Pembangunan II dibentuk Kementerian yang disebut *Menteri Muda Urusan Peranan Wanita*. Kemudian pada Kabinet Pembangunan III diubah menjadi *Menteri Negara Urusan Peranan Wanita*. Pada waktu yang bersamaan dibentuk organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita (isteri PNS), Dharma Pertiwi (isteri ABRI), IWAPI (pengusaha), dan sebagainya.

Setelah beberapa kali berganti Kabinet, *Menteri Negara Urusan Peranan Wanita* masih terus ada, hanya cakupan tugasnya saja yang berubah/bertambah. Namun pada Kabinet Persatuan Nasional, *Menteri Negara Urusan Peranan Wanita* tersebut berganti nama menjadi *Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan* yang bertanggung jawab terhadap perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan program kesetaraan dan keadilan gender.

Namun di sisi lain pada era Orde Baru ini sebagaimana disampaikan oleh DR. Ir. Hj. Aida Vitalaya S. Hubies ternyata beragam kekerasan terhadap perempuan merabak dan meningkat intensitasnya. Diantaranya kasus pembunuhan Marsinah, perkosaan dan serangan seksual di wilayah Daerah Operasi Militer (DOM), kasus kekerasan yang menimpa buruh migran dan pekerja rumah tangga, sampai kekerasan domestik. Kenapa organisasi perempuan seolah berdiam diri? Dapat dikatakan organisasi perempuan bentukan Orba telah **mereduksi** peran perempuan sebatas 3 (tiga) I yaitu (sebagai Isteri, Ibu dan Ibu rumah tangga). Tugas ini memang amat mulia, tetapi tanpa disadari tidak disengaja menyebabkan tidak adanya tempat bagi

perempuan **“sebagai manusia merdeka yang dapat mengexpresikan pikirannya bagi kemajuan kaum perempuan dari sudut kepentingan perempuan”**. Keadaan ini membuat berbagai persoalan kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan di masyarakat/di luar lingkup keluarga praktis terabaikan. Sebaliknya organisasi perempuan pada saat itu, memainkan peran sub ordinasi dan menyebar luaskan citra peran ideal perempuan dalam konteks 3 (tiga) I tersebut di atas, dalam konotasi **“kodrat”**. Dengan **“kodrat”** ini perempuan ideal dicitrakan bersifat “lemah lembut, tidak berbicara dengan suara keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas urusan suami, serta menjadi isteri penurut dan anak perempuan yang patuh”. Contoh *Panca Dharma Wanita* yang merumuskan peran perempuan “Isteri pendamping suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengatur rumah tangga dan pekerja penambah penghasilan keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang berguna”.

## 2) Perjuangan Perempuan dari Segi Politik

Seperti yang disampaikan oleh DR Ir. Hj. Aida Vitalaya S. Hubies bahwa pada pemerintahan ORBA, praktis telah memobilisasikan perempuan dengan kekuatan politik organisasi untuk tujuan politik tertentu. Atau telah memanfaatkan jaringan organisasi perempuan untuk mendominasi kaum perempuan (PKK, Dharma Wanita, Apsari dll), untuk tunduk dan patuh pada negara yang pada waktu itu ada pada komposisi kekuatan tunggal partai politik. Hal ini sebagai wujud kemunduran gerak pergerakan perempuan Indonesia (backlash) yang telah berhasil menutup seluruh progresifitas perempuan Indonesia dengan mitos-mitos yang diinternalisasikan ke dalam seluruh kehidupan masyarakat. Sehingga Aisyah Amini (Fraksi PPP DPR) menyatakan bahwa “Perempuan jugalah yang harus berjuang dan mau menerjuni dunia politik yang telah telanjur identik

dengan dunia yang didominasi laki-laki”. Kenyataan membuktikan bahwa ada tuntutan persyaratan yang lebih tinggi terhadap perempuan dibanding terhadap laki-laki bahkan untuk posisi yang sama dalam segala bidang.

Selanjutnya DR. Vitalaya menyatakan bahwa dalam terminologi “kekuasaan”, agar muncul hubungan yang setara dan berkeadilan di antara kelompok yang berdaya dan tidak berdaya, maka kelompok terakhir harus menyadari posisinya dan mampu melakukan posisi tawar politik dihadapan kelompok berdaya. Hal ini dapat terjadi bila dimulai dengan upaya menghapuskan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang seolah-olah telah menjadi tumbal dari ideologi *developmentalisme* (*pembangunanisme*) pada rezim Orba. Meskipun pada era ini pula telah diratifikasi CEDAW (konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Namun dalam pelaksanaannya belum ada keseriusan kehendak politik dari negara yang berlanjut sampai dengan saat ini (setelah Orba tumbang).

Kekerasan politik terhadap perempuan pada saat ini tidak hanya menyangkut aspek fisik tapi sudah meliputi hak-hak ideologisnya. Hasil penelitian Mitra Wacana Yogyakarta tentang pemilu (7 juni 1999) menyatakan, bahwa pemaksaan dari suami untuk memilih partai tertentu, pembatasan mobilitas politik perempuan, pembatasan akseptabilitas politik perempuan telah terjadi. Semua ini tidak terlepas dari kebijakan negara dan budaya patriarki yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain rendahnya kesadaran perempuan terhadap kekerasan politik yang didasari oleh hubungan kekuasaan yang asimetris (tidak seimbang, dominatif dan eksploitatif) dari negara dan masyarakat terhadap kaum perempuan yang terus-menerus, menyebabkan di bawah sadar mereka, hal ini merupakan kejadian biasa, bukan bias gender.

### 3) Gerakan Perempuan Indonesia Era Reformasi

Pada era ini merupakan tonggak **Redefinisi** peran politik perempuan selama Orba dengan ciri munculnya kelompok-kelompok perempuan yang melakukan kegiatan atas dasar “**empati**” terhadap penderitaan perempuan. Di antara kegiatan tersebut adalah pendampingan untuk meningkatkan pendapatan perempuan miskin, pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, pendidikan politik dan advokasi hak-hak perempuan, peningkatan kesadaran gender serta upaya-upaya menjembatani terwujudnya rekonsiliasi nasional atas dasar kemanusiaan. Sebagai prioritas, membongkar, menghapus dan memodifikasi mitos-mitos yang dibangun Orba tentang potret ideal perempuan, tetapi sebenarnya dibentuk di atas keringat dan pengorbanan batin kaum perempuan.

Contoh-contoh kegiatan tersebut adalah :

- Di Irian, Solidaritas edisi Nov-Des 1999 memuat kesaksian aktifis perempuan, Christina yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan di Biak Numfor telah terjadi sejak 1967.
- Suraiya dari Flower Aceh mengemukakan bahwa penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989. Solidaritas untuk rakyat Aceh tersebut tercermin dalam acara malam dana untuk korban DOM di Aceh, pada tanggal 24 November 1999. Di Palembang yang telah diikuti oleh beberapa organisasi perempuan seperti : Owa Indonesia – Palembang, LBH Apik Palembang, Yayasan Hakiki Riau, Flower Aceh, Yasva Bengkulu dan Perserikatan Solidaritas Perempuan Jakarta. Serta telah diluncurkan pula buku kisah penderitaan perempuan Aceh seperti Nyala Panyoet Tak Terpadamkan oleh Flower Aceh tanggal 25 November 1999. Kemudian seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan, yang berisi

laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) tentang kerusuhan Mei 1998 yang berdampak kepada perempuan, terbitan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu terjemahan dari laporan Pelapor Khusus PBB, Radikha Coormaraswamy yang menulis tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

- Sedang di Samarinda Kalimantan Timur, di Yogyakarta para aktivis perempuan melakukan aksi-aksi yang sama dengan menggunakan media radio dalam mensosialisasikan gagasan anti kekerasan, seperti Talk Show dengan tema *Kekerasan Terhadap Perempuan Buruh* di Radio Yasika FM di Ungaran Jawa Tengah; *Kekerasan dan Budaya Patriarki* disiarkan di 10 stasiun radio Yogyakarta menampilkan aktivis Nunuk Murniati dan Dr. Mansour Faqih dan lain-lain.
- Untuk isu spesifik perkosaan, di Lampung oleh LSM El Sapa telah diluncurkan buku *Suatu Kajian Teoritik-Kritis dan Empiris Kasus Tindak Perkosaan* yang mengajak agar semua pihak pro aktif dalam menghapuskan kekerasan khususnya perkosaan terhadap perempuan.
- Selain itu isu dan fakta kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, diungkap dan disajikan oleh Christine Yoseph dari Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia – Makasar (LBHP2I). Sajian ini menunjukkan bahwa sampai sekarang belum adanya instrumen hukum yang mendukung upaya penuntutan pelaku tindak kekerasan domestik dalam bentuk : Kekerasan fisik, psichis, kekerasan seksual, ekonomi, perkosaan. Sehingga pelaku masih bebas melakukannya, disamping lagi-lagi budaya patriarki dan budaya malu untuk bicara tentang aib keluarga sebagai kendala utama.

Untuk mengakomodir aksi-aksi serta temuan di atas perlu **mempertemukan pemerintah dan**

**masyarakat** sehingga sejumlah aktifis perempuan telah berinisiatif meluncurkan *Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan* di Hotel Indonesia tanggal 24 November 1999. Gugatan terhadap komitmen ini, *Kaulan Perempuan* telah menggelar aksi long march menuju bundaran Hotel Indonesia yang mendesak negara untuk segera menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pada tanggal 25 November 1999.

Dari fakta tersebut di atas menandakan bahwa pada era reformasi gerakan perempuan untuk mempolitikkan semua persoalan yang mereka hadapi tidak dapat dibendung, sekalipun oleh hegemoni budaya patriarki yang telah mengakar sampai saat ini, termasuk dalam perjuangan memilih presiden Megawati Sukarnoputri.

### **1.3 Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Perempuan di Tingkat Internasional**

Dari hasil konferensi di Beijing 1995 diidentifikasi sejumlah masalah yang banyak dihadapi kaum perempuan di sebagian besar dunia. Kumpulan masalah tersebut dikenal dengan 12 isu keprihatinan Beijing sebagai berikut :

- 1) Masalah perempuan dan kemiskinan, terutama karena kemiskinan struktural akibat dari kebijaksanaan pembangunan dan sosial budaya yang berlaku.
- 2) Keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan posisi tawar menawar menuju kesetaraan gender.
- 3) Masalah kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang kurang mendapat perlindungan dan pelayanan yang memadai.
- 4) Kekerasan fisik/non fisik terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun di tempat

kerja, tanpa mendapat perlindungan secara hukum.

- 5) Perempuan di tengah wilayah konflik militer dan kerusuhan, banyak menjadi korban kekejaman dan kekerasan pihak yang bertikai. Meskipun hal ini sudah dijamin oleh Konvensi Geneva, 1949.
- 6) Terbatasnya akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal dan pelatihan usaha.
- 7) Keikutsertaan perempuan dalam merumuskan dan mengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat dan negara masih sangat terbatas.
- 8) Terbatasnya lembaga-lembaga dan mekanisme yang dapat memperjuangkan kaum perempuan baik dalam sektor pemerintah maupun non-pemerintah (swasta).
- 9) Perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak azasi perempuan secara sosial maupun hukum masih lemah.
- 10) Keterbatasan akses kaum perempuan terhadap media massa, sehingga ada kecenderungan media informasi menggunakan tubuh wanita sebagai media promosi dan eksploitasi murahan.
- 11) Kaum perempuan paling rentan terhadap pencemaran lingkungan seperti air bersih, sampah industri, dan lingkungan lain.
- 12) Terbatasnya kesempatan dalam mengembangkan potensi dirinya dan tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

#### **1.4 Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia**

Di Indonesia terdapat beberapa hal yang merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai keprihatinan bersama, antara lain seperti :



- 1) Masih banyak **peraturan perundang-undangan** yang diskriminatif terhadap kaum perempuan terutama di tempat kerja dan skala penggajian. Contoh Undang-undang Ketenaga Kerjaan yang masih bias gender.
- 2) Banyak terjadi tindak **kekerasan, perkosaan, dan penyiiksaan fisik** terhadap kaum perempuan tanpa mendapat perlindungan hukum yang memadai. Contoh : Terjadinya kekerasan fisik isteri oleh suami, perkosaan, dan penindasan terhadap pekerja perempuan.
- 3) Sindikat **penipuan dan perdagangan** perempuan untuk diperkerjakan dengan penghasilan yang menjanjikan. Contoh : Ditemukannya Yayasan TKW yang menelantarkan/atau memeras perempuan yang akan bekerja di luar daerah/negeri.
- 4) **Eksplotasi tubuh**, dan tindakan **pelecahan seksual** atau **pornografi** yang dilakukan dengan alasan seni dan pariwisata. Contoh: Beberapa majalah/surat kabar dengan cover gambar perempuan yang menggunakan pakaian tidak sopan/sangat sensual.
- 5) Budaya **kawin muda** yang diikuti dengan tingkat perceraian yang tinggi dapat merendahkan martabat perempuan. Contoh : Masih ditemukannya perempuan yang kawin muda pada usia kurang dari 6 tahun dan diikuti dengan perceraian yang tinggi.
- 6) Budaya melamar dengan **antaran dan mas kawin** yang mahal sehingga dapat menimbulkan persepsi seperti jual beli perempuan (pengaruh adat istiadat daerah tertentu). Contoh : Di beberapa adat di propinsi tertentu, menetapkan mas kawin seperti 1 ekor sapi, emas, atau gading, yang menimbulkan kesan seolah-olah perempuan ditukar dengan harta.
- 7) Pemahaman dan **penafsiran ajaran agama** yang salah atau bercampur aduk dengan budaya yang tidak berpihak terhadap perbaikan status perempuan. Contoh : Bapak adalah kepala

rumah tangga, sehingga Bapak berkewajiban memberi nafkah. Sebenarnya itu tidak berarti bahwa ibu tidak boleh bekerja mencari nafkah.

8) Diskriminasi dalam **kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja.**

Contoh :

- a. Undang-undang Pendidikan Nasional yang masih bias Gender
  - b. Dalam keluarga yang tidak mampu/memiliki keterbatasan Ekonomi, kesempatan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki untuk memperoleh pendidikan.
- 9) Masih banyak anggapan yang merendahkan atau meremehkan kaum perempuan. Contoh : “ah kamu perempuan tahu apa”.
- 10) Masih ada budaya adat istiadat yang bias gender. Contoh : Laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan atau sebaliknya, seperti mengasuh anak untuk laki-laki dan memperbaiki atap untuk perempuan.
- 11) Dari segi politik, telah menuntut persyaratan yang lebih terhadap perempuan dibanding laki-laki, untuk menduduki posisi yang sama.
- 12) Dari aspek kesehatan reproduksi masih ada pendapat bahwa KB adalah urusan perempuan, tabu membicarakan masalah-masalah kesehatan reproduksi secara terbuka.

Masalah tersebut perlu dianalisa secara cermat untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

## Rangkuman

Perjuangan perempuan muncul dari adanya kesadaran perempuan akan keteringgalannya di banding dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut telah dikembangkan konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki yang diawali dengan timbulnya gerakan global yang dipelopori oleh perempuan dan berhasil mendeklarasikan melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC) yang diakomodasi pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI). Selanjutnya di Mezcoco City diselenggarakan World Conference International Year Of Women PBB dan diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan (WID).

Di Copenhagen dilakukan World Conference UN Mid Decade Of Women, kemudian disyiahkannya *UN Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, sedang di Nairobi diadakan *World Conference On Result Of Ten Years Women Movement* yang menjelaskan Nairobi *Looking Forward Strategies for the Advancement of Women*.

Selanjutnya PBB membentuk satu badan yang disebut The United Nations Fund for Women (UNIFEM), untuk melakukan studi, advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender, namun hasilnya kurang memadai.

Kemudian dari berbagai studi tema WID (Women in Development) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi WAD (Women and Development atau perempuan dan pembangunan).

Pada perkembangan selanjutnya Studi Aderson dan Moser merekomendasikan bahwa tanpa keterlibatan laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik, sehingga dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan Gender And

Development (GAD). ICPD di Cairo tahun 1994 World Conference On Women Beijing menyepakati berbagai komitmen operasional tentang perbaikan status dan peranan perempuan dalam pembangunan yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Di Indonesia, perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dimulai oleh R.A. Kartini sejak tahun 1908. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan R.A. Kartini ditindak lanjuti oleh Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian ditetapkan sebagai **Hari Ibu**.

Diera Orba perjuangan untuk meningkatkan kualitas perempuan serta menegakkan kesetaraan dan keadilan gender agak tenggelam, namun semangat itu bangkit kembali sejak Era Kabinet Persatuan Nasional. Walaupun sudah banyak upaya dan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, baik di dunia International maupun di Indonesia, kondisi kesenjangan gender masih dijumpai.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan sejarah perjuangan perempuan di tingkat Internasional dalam rangka pemahaman tentang gender.
2. Jelaskan tentang sejarah perjuangan perempuan di Indonesia
3. Jelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah poster mengenai urutan sejarah perjuangan perempuan baik di tingkat internasional maupun nasional.

**Daftar Pustaka**

- Tim Teknis Pokja Peran Serta Masyarakat. 2000. Materi Pokok Penyadaran Gender. Jakarta : Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.
- NTTPEP. 2007. Panduan Pelatihan Keadilan Gender. NTTPEP-AusAID, Kabupaten Ende. Ende NTT.
- Ihromi, TO. 1995. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

---

## **BAB V**

# **PERSPEKTIF FEMINIS DALAM MENGANALISIS PERMASALAHAN PEREMPUAN**

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perspektif feminis liberal.
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perspektif feminis marxis.
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perspektif feminis radikal
4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perspektif feminis psikoanalisis.
5. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perspektif feminis sosialis.
6. Mahasiwa dapat menganalisis permasalahan perempuan berdasarkan perspektif-perspektif feminis.

Feminisme dapat diartikan suatu paham yang bertekad memperbaiki atau mengubah suatu keadaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dalam masyarakat. Untuk menganalisis permasalahan perempuan, di Barat telah dikembangkan beberapa perspektif feminis yang mencoba mendeskripsikan keterbelakangan atau opresi yang dialami perempuan, menjelaskan penyebabnya, konsekuensinya, dan menemukan strategi perempuan untuk membebaskan diri dari keterbelakangan itu. Meskipun demikian,

masing-masing perspektif ini hanya menjawab sebagian permasalahan perempuan dan sementara saja, sesuai dengan kelemahan dan kelebihan metodologi yang dimilikinya. Perspektif feminis tersebut, antara lain yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, Feminisme Psikoanalisa, Feminisme Sosialis, dan Feminisme Eksistensialis.

### **5.1 Feminisme Liberal**

Feminisme ini dirumuskan pertama kali oleh Mary Wollstonecraft (1759—1799) dalam tulisannya “*A Vindication of the Rights of Women*” (Feminis liberal abad ke-18), John Stuart Mill dalam tulisannya “*The Subjection of Women*” (Feminis liberal abad ke-19), dan Betty Frieden (1963) dalam tulisannya “*The Feminine Mystique dan The Second Stage*”

Aliran feminis liberal merupakan perspektif feminis yang berasumsi bahwa subordinasi perempuan terjadi karena adanya keterbatasan budaya dan hukum yang membatasi perempuan dari akses ke sektor publik. Masyarakat beranggapan bahwa kondisi alamiah yang dimilikinya maka perempuan dianggap kurang memiliki kecerdasan dan kekuatan fisik dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik.

Anggapan masyarakat mengenai perempuan tersebut disangkal oleh Feminisme Liberal yang mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal tentang hakikat hidup manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki manusia. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama, dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama.

Mary Wollstonecraft dalam tulisannya “*A Vindication of the Rights of Women*” menyangkal pandangan tentang kondisi alamiah perempuan yang menyebabkan perempuan kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik seperti laki-laki. Saat itu ,

industrialisasi tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pasaran tenaga kerja. Perempuan dikurung di dalam rumah dan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Hal itu membuat perempuan tidak berkembang, dan sebaliknya laki-laki leluasa bergerak di luar rumah dan dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Oleh karena itu, menurut perspektif itu agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki, sistem budaya dan hukum yang menghambat kemajuan perempuan harus diubah dimana perempuan harus berpendidikan sama dengan laki-laki.

John Stuart Mill dalam tulisannya "*The Subjection of Women*" menyatakan pendapatnya yang berbeda dengan Mary Wollstonecraft bahwa agar persamaan antara laki-laki dan perempuan dapat tercapai, perempuan tidak hanya harus diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, tetapi juga harus berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai hak sipil yang sama dengan laki-laki. Setiap individu manusia harus diberi hak yang sama untuk mengejar apa yang diinginkannya.

Betty Frieden (1963) dalam tulisannya "*The Feminine Mystique*" memiliki pandangan bahwa perempuan melalui usahanya yang keras akan mampu menyamai laki-laki. Namun, perempuan tidak perlu mengorbankan perkawinan dan peran mereka sebagai ibu hanya untuk karir. Perempuan yang karirnya tinggi tidak berarti dia harus menolak mencintai atau dicintai oleh laki-laki dan mengasuh anaknya. Perempuan yang normal adalah perempuan yang bermoral, yang bisa mendahulukan perkawinannya dan perannya sebagai ibu di atas karirnya. Kemudian, Zillah Eisenstein dalam bukunya *The Radical Future of Liberal Feminism* mengatakan bahwa pendapat Betty Frieden ini dinilai kurang radikal dibandingkan dengan pendapat Wollstonecraft dan Mill. Rosemarie Tong (1989) dalam tulisannya "*Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*" menilai bahwa "*The Feminine Mystique*" dipandang gagal untuk mempertimbangkan bagaimana



sulitnya bagi perempuan untuk menggabungkan pekerjaan rumah tangga dengan karier. Seperti halnya Wollstonecraft dan Mill, Frieden mengajak perempuan berperan dalam dunia publik tanpa mengajak laki-laki ikut berperan dalam dunia rumah tangga.

Dalam “*The Second Stage*”, Frieden telah melihat betapa sulit bagi perempuan untuk berperan ganda. Perempuan tidak mampu melayani 2 majikan, yaitu “boss di kantor/pabrik, dan suami di rumah”. Selain itu, bagi perempuan “janda” yang hidup dari pemberian mantan suaminya atau mendapatkan santunan dari Departemen Sosial, sulit mendapatkan kesempatan yang sama dengan perempuan “istri”. Kesempatan yang sama akan dicapai jika pemerintah memberikan subsidi yang cukup memadai kepada para janda tersebut. Tampak bahwa Frieden telah beralih dari liberal yang klasik ke liberal kesejahteraan (*welfare liberal*). Melalui “*The Second Stage*”, Frieden terlihat ingin menggantikan feminisme dengan humanisme dengan mengajak perempuan agar bekerja bersama-sama dengan laki-laki untuk menghasilkan masyarakat yang manusiawi. Namun, ajakan ini mendapatkan kritik dari kaum feminis sendiri karena dianggap terlalu dini untuk mengajak perempuan menjadi humanis jika konsep “human being” itu sendiri masih mengandung “male” bias di dalamnya. Menurut Tong, kaum Feminis Liberal ini berkeinginan agar manusia, laki-laki dan perempuan mengembangkan kepribadian yang androgini, yaitu kepribadian yang tidak mengaitkan derajat hierarki dengan jenis kelaminnya.

## **5.2 Feminisme Marxis**

Sebagai reaksi terhadap feminis liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peranan perempuan, Feminis Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan perempuan bukan karena tindakan individu secara sengaja melainkan karena struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan kapitalisme.

Perempuan akan sulit memperoleh kesempatan yang sama jika tetap hidup dalam masyarakat berkelas. Bertolak dari teori Marxis tentang hakikat manusia (*human nature*) dan teori Marxis tentang masyarakat, ekonomi dan politik, serta teori Engels tentang keluarga dalam "*The Origin of the Family, Private Poverty and the State*", perspektif ini mencoba memahami mengapa perempuan tidak pernah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, dengan menganalisis hubungan antara status pekerjaan perempuan dengan citra diri perempuan.

Oleh karena itu, Feminis Marxis tidak mempersoalkan sama sekali mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah reproduksi perempuan (misalnya kehamilan, kelahiran, dan mengasuh anak) dan juga seksualitas perempuan (misalnya pornografi, pelacuran).

Fokus Feminis Marxis kepada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan yakni: (1) bagaimana pranata keluarga dikaitkan dengan kapitalisme, (2) bagaimana pembagian kerja berdasarkan seksual yaitu laki-laki bekerja di luar rumah (produktif) sedangkan perempuan bekerja di rumah mengurus rumah tangga, (3) pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga tidak dianggap penting dan dianggap bukan pekerjaan, (4) jika perempuan kerja di luar rumah, pekerjaannya membosankan dan memperoleh upah yang lebih rendah dari laki-laki.

Perspektif ini perempuan merupakan "kelas sosial" tersendiri karena pekerjaan yang mereka lakukan, apakah mereka itu sebagai istri, anak perempuan, keponakan perempuan, adik perempuan dari laki-laki kelas proletar, adalah sama yaitu pekerjaan rumah tangga.

Pada saat kapitalisme belum berkembang, menurut perspektif ini, keluarga adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Kemudian, dengan berkembang-

nya kapitalisme industrial, keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. Kegiatan produksi barang-barang kebutuhan manusia telah beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam kegiatan produksi. Kemudian, terjadi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan bekerja di rumah mengurus rumah tangga.

Dalam sistem kapitalisme, laki-laki memproduksi barang sehingga dikategorikan melakukan pekerjaan produktif dan mendapatkan imbalan. Perempuan hanya memproduksi barang yang bernilai guna sederhana (*simple use value*), misalnya makanan yang dimasak untuk dimakan sendiri oleh anggota rumah tangganya, pakaian yang dijahit untuk dipakai anggota rumah tangganya, dan bukan makanan yang dikemas dan pakaian jadi untuk dijual di pasar atau di toko untuk mendapatkan upah. Perempuan melakukan pekerjaan penting untuk memelihara atau memulihkan tenaga anggota keluarganya yang bekerja di luar rumah (*labour power reproduction*) untuk memproduksi barang yang bernilai tukar (*exchange value*), tetapi perempuan tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya, bahkan pekerjaannya itu dipandang sebagai pekerjaan yang “non-produktif”. Inilah yang menjadi ganjalan Feminis Marxis. Oleh karena itu, Feminis Marxis berpendapat agar perempuan juga diberi kesempatan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi.

Feminis Marxis lain yaitu Margaret Benston meragukan pendapat Engels yang berpandangan bahwa perempuan harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak membebaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga. Menurut Margaret Benston, perempuan juga harus dibebastugaskan dari pekerjaan rumah tangga agar tidak terjadi beban ganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan daerah kegiatan rumah tangga (*Socialization of domestic work*) artinya pekerjaan rumah tangga tidak dilakukan individual melainkan bersama-sama, misal: dapur umum. Cara ini dianggap tidak hanya akan

membebasikan perempuan dari pekerjaan rumah tangga tetapi juga akan membuat orang lain mengakui betapa pentingnya pekerjaan rumah tangga bagi kelangsungan hidup semua anggota rumah tangga.

Feminisme Marxis lainnya lagi yaitu Dalla Costa dan Selma James berpendapat bahwa untuk mengeluarkan perempuan dari ketertindasannya ialah dengan memberikan upah kepada perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga karena pekerjaan itu juga produktif, karena menciptakan nilai tambah (*surplus value*), dari pada memberikan beban ganda kepada perempuan. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan perempuan adalah kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pekerjaan lainnya. Perempuan tidak hanya menyediakan makanan dan pakaian bersih bagi para pekerja tetapi juga menyediakan ketenangan emosional dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu adalah kewajiban majikan si suami yang harus membayar upah perempuan karena perempuan tetap menjaga kelancaran jalannya sistem kapitalis.

Feminisme Marxis Barbara Bergmann tidak setuju dengan pendapatnya Dalla Costa dan Selma James yang perlunya melakukan pembayaran upah terhadap perempuan atas pekerjaan RT. Alasannya adalah karena upah tersebut akan mengisolasi perempuan dari dunia kerja, pekerjaan rumah tangga yang dibayar akan mengkomoditikan segalanya termasuk hubungan keluarga.

Feminisme Marxis, Nancy Holmstrom, mengkritisi pendapat Benston serta Dalla Costa dan Selma James bahwa perempuan merupakan satu kelas sosial tersendiri dan karenanya mengalami eksploitasi yang sama sebagai ibu rumah tangga. Holmstrom melihat kelemahan argumentasi Benston serta Dalla Costa dan Selma James, yaitu: (1) meskipun perempuan (*bourgeois* dan *proletar*) sama-sama melakukan pekerjaan RT, eksploitasi yang dialami juga berbeda karena kondisi materil berbeda, (2) sistem kapitalis membutuhkan perempuan sebagai angkatan kerja.

Dalam perkembangannya, terdapat kemajuan teknologi untuk mengatur kehamilan dan kelahiran, menghasilkan alat-alat yang meringankan pekerjaan perempuan, telah dapat mengatasi permasalahan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Dengan adanya gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak, meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang meningkat, berkembangnya jenis pekerjaan di sektor jasa atau jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan perempuan (*feminization of work*) misal: sekretaris, kasir, respionis, pelayan toko, pelayan hotel, perawat dan lainnya, menyebabkan terjadinya perubahan pada komposisi angkatan kerja. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa modal membutuhkan perempuan untuk ikut serta dalam pasaran tenaga kerja.

Bruegel dalam *Feminis Review* (1979), perempuan yang bekerja itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan yang bekerja tetap berperan sebagai ibu rumah tangga, mudah diberhentikan jika perekonomian mengalami kegoncangan, tetapi juga mudah untuk ditarik bekerja karena upahnya yang murah. Perempuan tidak menuntut upah yang tinggi karena hanya sebagai pendapatan tambahan. Jadi, bagi kapital, perempuan hanya dipandang sebagai tenaga kerja cadangan (*reserve army of labour*). Dengan demikian, perhatian Feminis Marxis kini tertuju pada ketidakadilan pembagian pekerjaan secara seksual yang berlaku pula di tempat kerja.

### **5.3 Feminisme Radikal**

Aliran feminis radikal merupakan perspektif feminis yang memperhatikan keterbelakangan perempuan dari akarnya, yaitu yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas perempuan. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki, yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan perempuan. Oleh karena itu, sistem patriarki harus dirombak dan dicabut hingga ke akar-akarnya.

Aliran ini menentang aliran yang berpandangan bahwa keadaan biologi perempuan yang berbeda dari laki-laki adalah kehendak alam yang tidak dapat diubah, merupakan takdir atau kodrat yang tidak perlu dipertentangkan tapi justru saling mengisi agar terwujud keteraturan alamiah (*natural order*).

Menurut Feminisme Radikal, keteraturan alamiah tidak perlu dipertahankan karena akan menghambat kemajuan perempuan. Feminisme Radikal, Shulamith Firestone dalam bukunya "*The dialectic of sex*", patriarki berakar pada perbedaan biologi laki-laki dan perempuan.

Firestone merefleksikan pendapat Marx dan Engels mengenai peran reproduktif perempuan, bahwa perbedaan jenis kelamin (*sex class*) adalah konsep sentral untuk menganalisis ketimpangan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan bukan pada kelas ekonomi (*economic class*) yaitu kelas sosial yang berdasarkan pada pemikiran alat produksi. Menurut Firestone, perbedaan kelas sosial yang sebenarnya adalah perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan.

Jadi untuk memahami mengapa perempuan berada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, diperluakn penjelasan biologis, bukan penjelasan ekonomi. Ketimpangan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang ada sekarang ini, karena kenyataannya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan reproduksi yang berbeda.

Subordinasi perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat karena hubungan sosial dalam proses reproduksi (*social relations of reproduction*) antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan sosial dalam proses produksi (*social relations of production*) antara pengusaha dan pekerjanya.

Untuk menghapuskan semua bentuk hubungan sosial di mana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki, diperlukan revolusi biologis. Misal, alat kontrasepsi KB, dan inseminasi buatan. Laki-laki dan perempuan akan berhenti memainkan peran

reproduksi yang berbeda. Hal ini akan mengurangi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, kemudian perempuan akan lebih leluasa berkibrah pada ranah publik, sama-sama mencari nafkah bagi keluarga.

Pemikiran Firestone mengusulkan agar manusia mampu menghapuskan *patriarkhal reproduction dan capitalist production*. Sebabnya, menurut Firestone, percuma saja semua persamaan hak dan kesempatan yang dimiliki perempuan—seperti yang diinginkan oleh Feminisme Liberal—apabila perempuan tetap berperan lebih besar pada kegiatan reproduksi.

Feminisme radikal, Merge Pierce, mendukung pendapat Firestone, yang dalam novel fiksi ilmiahnya yang berjudul “*Women on the Edge of Time*” tentang dunia baru “Mattapoi-sett”, yaitu menjelaskan tentang dunia di mana perempuan tidak didefinisikan dalam fungsi reproduksinya karena berfungsinya teknologi baru dalam reproduksi, dan di mana laki-laki dan perempuan menyukai mengasuh anak.

Feminisme radikal lainnya yaitu Mary O'Brien mengkritisi pendapat Firestone dan Pierce bahwa opresi perempuan bukanlah karena peran reproduksi alamiahnya tapi karena penguasaan laki-laki atas kondisi biologis perempuan.

Jadi untuk membebaskan perempuan adalah bahwa perempuan harus memahami bahwa sumber keteropresian mereka adalah peran reproduktifnya adalah juga sumber pembebasan mereka sendiri. Opresi yang dialami perempuan menurut sudut pandang keterasingan kaum laki-laki dalam proses reproduksi. Patriarkhi adalah kompensasi kaum laki-laki bagi keterasingannya dalam proses reproduksi dan sebagai usaha untuk meniadakan kesadaran keterasingannya. Karena laki-laki terasing dari proses reproduksi, maka mereka terasing pula dari anak-anaknya, karena: (1) kontinuitas tempat dan waktu antara ovum dan anak (janin) yang dihasilkan tidak terputus dan berlangsung dalam rahim perempuan, sedangkan kontinuitas waktu

dan tempat antara sperma dan anak (janin) yang dihasilkan terputus dan berlangsung di luar tubuh laki-laki; (2) perempuan yang hamil, bukan laki-laki; (3) hubungan antara perempuan dan anak adalah pasti. Perempuan tahu bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan adalah darah dagingnya sendiri, sedangkan hubungan laki-laki dengan seorang anak tertentu, tidak jelas dan pasti.

Feminisme radikal, Adrienne Rich, juga berpendapat bahwa laki-laki sebenarnya iri dan ketakutan akan kemampuan reproduktif perempuan. Sebab kaum laki-laki menyadari bahwa kehidupan manusia ada di tangan perempuan. Perempuan mampu memelihara kehidupan dan laki-laki juga takut bahwa perempuan juga mampu merusak kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan reproduksi perempuan dibatasi, misal: (1) Keberadaan dokter ahli kebidanan dan kandungan menggeser peran bidan dan dukun bayi; (2) Dokter dan psikolog laki-laki yang secara perlahan menulis tentang berbagai aturan dan cara bagaimana perempuan menghadapi kehamilan dan kelahiran; (3) Dokter kandungan mendikte perempuan bagaimana merasakan sakit saat melahirkan, apa yang harus dimakan saat hamil, dan sebagainya yang kadang berlawanan dengan apa yang dirasakan perempuan.

Feminisme radikal, Kate Millett, tidak memfokuskan perhatiannya pada masalah reproduksi. Kate Millet dalam tulisannya "*Sexual politics*" memfokuskan perhatiannya pada masalah seksualitas perempuan. Asumsi dasarnya adalah bahwa seks itu politik, sebab hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan paradigma bagi semua hubungan kekuasaan seperti hubungan antar ras, hubungan politik, hubungan ekonomi dan sebagainya. Penguasaan laki-laki atas ranah domestik dan publik adalah patriarki. Untuk membebaskan perempuan dari kungkungan patriarki maka kekuasaan laki-laki harus dihapuskan. Untuk menghapusnya, laki-laki dan perempuan harus menghapuskan perbedaan status, peran dan temperamen antara laki-laki dan perempuan yang



didasari oleh perbedaan jenis kelamin, yang dikonstruksikan masyarakat yang patriarki.

Menurut Millet, ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan meyakinkan bahwa laki-laki adalah pihak yang dominan dan unggulan atau maskulin, sedangkan perempuan adalah pihak yang subordinat atau feminin. Ideologi ini sangat kuat karena ditanamkan melalui suatu pengkondisian sedemikian rupa sehingga laki-laki memperoleh kepercayaan dari perempuan atas unggulannya. Pengkondisian dilakukan melalui institusi-institusi sosial dalam masyarakat, seperti keluarga, gereja, sekolah/perguruan tinggi, yang mana institusi-institusi sosial tersebut membenarkan dan memperkuat subordinat perempuan terhadap laki-laki yang hasilnya kebanyakan para perempuan menginternalisasikan rasa inferioritasnya terhadap laki-laki. Millet memimpikan masyarakat yang “*Androgini*”, yaitu masyarakat yang para anggotanya, laki-laki dan perempuan, mampu mengintegrasikan sifat-sifat feminin dan maskulin menjadi satu sifat yang dimiliki oleh semua manusia.

Sama dengan peran gender, peran yang berkaitan dengan seksualitas adalah peran yang dikembangkan oleh masyarakat (*socially constructed*). Peran seksual (*sexual role*) ini membatasi identitas dan perilaku perempuan sulit untuk mengidentifikasikan dan mengembangkan kebutuhan dan keinginan seksualnya. Bagi feminis radikal, seksualitas adalah isu yang krusial dalam feminisme karena “agresi” dan “kebutuhan” untuk mendominasi merupakan bagian yang rutin dari apa yang dikatakan sebagai seksualitas laki-laki yang normal. Kekerasan terhadap perempuan dinormalisasikan dan dilegitimaskan dalam praktik-praktek seksual melalui asumsi bahwa dalam hal seks, secara alamiah laki-laki itu agresif dan dominan, sedangkan perempuan pasif dan tunduk.

Feminis radikal berpendapat bahwa perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki di bidang apapun (politik, sosial, ekonomi), kecuali jika hubungan

heteroseksual itu benar-benar egalitarian. Keadaan ini agaknya sulit dicapai selama seksualitas perempuan diinterpretasikan sebagai pemenuh kebutuhan seksualitas laki-laki.

Pornografi juga dipandang sebagai gejala (*symptom*) dan simbol penguasaan laki-laki atas seksualitas perempuan. Perempuan akan tetap tersubordinasi jika seksualitasnya tidak ditinjau lagi dan direkonstruksikan.

#### **5.4 Feminisme Psikoanalisis**

Perspektif ini, bertolak dari teorinya Freud yang menekankan seksualitas adalah unsur yang krusial dalam pengembangan hubungan gender. Seksualitas perempuan dan laki-laki berbeda, yang berakar pada perbedaan *psyche* perempuan dan laki-laki yang disebabkan perbedaan biologi antara perempuan dan laki-laki.

Menurut Freud, anak dalam perkembangannya menjadi manusia dewasa, harus melewati beberapa tahapan perkembangan psikoseksual. Jadi temperamen mereka dipengaruhi oleh bagaimana mereka melalui tahapan perkembangan psikoseksual. Gender, perbedaan temperamen, perilaku, sifat antara perempuan dan laki-laki, adalah hasil proses pendewasaan seksual yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, ketika dewasa peran gender mereka juga berbeda.

Freud dan pengikutnya dikritik oleh Betty Frieden, Shulamit Fierstone, Kate Millett. Mereka menentang bahwa keadaan biologi laki-laki dan perempuan adalah faktor penentu tentang terjadinya sistem kekuasaan yang patriarki dalam masyarakat dan keluarga. Mereka berpendapat bahwa kedudukan sosial dan ketidakberdayaan perempuan tidak ada kaitannya dengan biologi perempuan. Sifat feminin yang dimiliki perempuan adalah ciptaan masyarakat.

Feminis yang sependapat dengan Freud adalah Nancy Chodorow, Carol Giligan, Dorothy Dinnerstein,

dan Juliet Mitchell. Mereka mengembangkan feminisme psikoanalisis dengan fokus yang berbeda, yaitu menganalisis tahapan pra-oedipus kompleks dimana hubungan ibu dan anak pada tahapan itu sangat kuat dan mereka yang menginterpretasikan tahapan oedipus kompleks. Feminisme psikoanalisis, berkeyakinan bahwa tahapan pra-oedipus kompleks merupakan kunci untuk memahami bagaimana seksualitas dan gender yang timpang, dimana laki-laki berada pada posisi superordinate. Menurut Dinnerstein dan Chodorow, hampir semua perempuan melakukan pengasuhan anak. Jika laki-laki juga ikut mengasuh anak, maka anak-anak (laki-laki dan perempuan) akan menyadari bahwa ayah dan ibu itu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan

Dalam tahapan pra-oedipus kompleks, menurut Dinnerstein, dalam tulisannya *The Mermaid and the Minotour* menyatakan bahwa hubungan ibu dengan bayinya adalah simbiotik, sebab bayi belum mampu membedakan dirinya dan ibunya. Ibu adalah sumber kenikmatan dan juga kepahitan karena si bayi tidak mampu memastikan apakah kebutuhan fisik dan psikologisnya dapat terpenuhi terus. Oleh karena itu, pada bayi tumbuh perasaan yang bertentangan dengan figur ibunya (perempuan) dan apa yang diberikan oleh ibunya (alam fisik/materiil).

Bagi anak laki-laki, karena mereka tidak ingin lagi memahami ketergantungan pada semua bentuk kekuatan yang ada, mereka berusaha menguasai perempuan dan alam. Bagi anak perempuan, merasa ketakutan akan kekuatan ibunya dalam dirinya sendiri, maka mereka membutuhkan dikuasai oleh laki-laki.

Tragisnya, kebutuhan laki-laki menguasai perempuan dan kebutuhan perempuan dikuasai laki-laki, berakibat kepada pengaturan gender yang kemudian menjadi paradigma bagi hubungan sosial antar manusia yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Pengaturan gender ini disebabkan oleh peran yang lebih besar dalam pengasuhan bayi/anak oleh perempuan. Maka Dinnerstein mengusulkan agar

laki-laki juga melakukan pengasuhan bayi dan anak agar tidak terjadi ketergantungan gender yang timpang.

Feminisme psikoanalisis, Chodorow mengkritik Dinnerstein dalam bukunya: *The Reproduction of Mothering*. Mengapa perempuan selalu memiliki naluri untuk menjadi ibu bukan karena diarahkan oleh alam, dan juga tidak ada terkait dengan pilihan sadarnya namun merupakan pilihan di bawah sadarnya. Keterampilan agar menjadi ibu yang benar tidak hanya dipelajari dengan meniru (sosialisasi), tidak juga melalui bertindak, atau dipaksakan oleh laki-laki. Melainkan mulai dikembangkan saat perempuan masih berada pada tahapan pra-oedipus kompleks.

Dalam tahapan ini, perempuan dan laki-laki mempunyai pengalaman yang berbeda.

- Bagi anak laki-laki, tubuh ibunya tidak seperti tubuh dirinya. Begitu memasuki tahap oedipus kompleks dirasakannya bahwa ibunya bukanlah mereka. “ke-Otherness-an” ibunya. Kemudian mereka berpisah karena mereka menyadari kekuasaan dan prestasi harus diperolehnya melalui pengidentifikasian dirinya dengan laki-laki lain, yaitu ayahnya.
- Bagi anak perempuan, hubungan ibu-anak pada tahap oedipus kompleks disebut sebagai simbiosis yang berkepanjangan. Simbiosis itu melemah ketika anak memasuki tahap oedipus kompleks, tapi tidak pernah putus sama sekali. Anak perempuan mencoba menjaga jarak dengan ibunya adalah karena sesuatu yang disimbolkan oleh ayahnya, yaitu *phallus*, yang merupakan simbol otonomi dan kekuasaan yang mencerminkan subjektivitas di satu pihak dan kemampuan memberikan kepuasan seksual kepada perempuan, yaitu ibunya di pihak lainnya. Anak perempuan mengalami “*penis envy*”, yaitu iri kepada kelamin laki-laki dan juga karena organ seksual yang memberikan kepuasan seksual kepada ibunya. Anak perempuan, kemudian

memindahkan objek cintanya kepada laki-laki dari ibunya, tapi tetap mengidentifikasikan dirinya dengan ibunya.

Jadi anak laki-laki mencari identifikasi kepada ayahnya, sedang anak perempuan mengidentifikasikan dirinya terhadap ibunya. Implikasi sosial dari perkembangan psikoseksual anak-anak laki dan perempuan telah menyebabkan lahirnya pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat yang tidak menguntungkan perempuan.

Feminisme psikoanalisis, Juliet Mitchell dalam bukunya *“Psychoanalysis and Feminism”* mencoba menjelaskan bagaimana makhluk sosial berkembang dari makhluk biologi. Menurut Mitchell, perkembangan psikoseksual adalah proses interpretasi sosial dari keadaan biologi, dan bukan manifestasi dari keadaan biologi semata.

## **5.5 Feminisme Sosialis**

Perspektif ini muncul karena ketidakpuasan terhadap feminis Marxis yang pada intinya berdasarkan pada pemikiran Marxis yang buta gender. Artinya, masalah kelas sosial tidak ada sangkut pautnya dengan masalah gender yang hidup di masyarakat. Perspektif ini muncul juga karena ketidakpuasan terhadap analisis feminis radikal psikoanalisis.

Aliran feminis sosialis berasumsi bahwa hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan atau opresi yang dialami perempuan. Penyebab yang lain adalah sistem patriarki yang masih mengungkung kehidupan perempuan. Feminis sosialis menganggap bahwa keterbelakangan atau opresi perempuan merupakan akibat dari kontrol laki-laki atas kerja produktif dan reproduktif perempuan di rumah (yang didefinisikan secara luas sebagai patriarki), dan akibat dari dominasi kelas dan eksploitasi tenaga kerja perempuan di bawah sistem kapitalis.

Feminis sosialis mengembangkan dua pendekatan yang berbeda. Pertama, teori sistem berganda (*dual systems theory*), yaitu teori yang menggabungkan penjelasan tentang patriarki yang non materialis dengan penjelasan tentang kapitalisme yang materialis. Teori sistem berganda ini dikembangkan oleh Heidi Hartmann dalam bukunya *The Unhappy Marriage between Marxism and Feminism*, dan Juliet Mitchell dalam bukunya *Women's Estates*. Kedua, teori yang menganalisis kapitalisme dan patriarki secara bersama-sama dengan menggunakan satu konsep yang disebut teori kesatuan sistem (*unified systems theory*). Teori ini dikembangkan oleh Irish Young dan Allison Jaggar.

Tong mengutip pendapat Irish Young dari tulisannya yang berjudul *Beyond the Unhappy Marriage* (1980), yang mengatakan bahwa konsep pembagian kerja gender dapat digunakan untuk menganalisis kapitalisme dan patriarki secara bersama-sama. Alasannya adalah sesungguhnya patriarki dan kapitalisme tidak berfungsi secara terpisah. Patriarki tidak beroperasi secara eksklusif di dalam keluarga, demikian juga kapitalisme tidak berfungsi di luar keluarga atau di arena publik.

Allison Jaggar (1983) dalam tulisannya *Feminist Politics and Human Nature*, yang dikutip oleh Tong mengatakan bahwa konsep alienasi (*keterasingan*) dianggap mampu mengakomodasi penjelasan tentang perspektif feminis sebelumnya (*radikal, liberal, dan marxis*). Jaggar menyebutkan bahwa keterasingan perempuan meliputi seksualitas (*sexuality*), pengibuan (*motherhood*), dan kemampuan intelektualnya (*intellectual capacities*). Keterasingan perempuan dari kemampuan intelektualnya dapat dilihat di antaranya dari fakta bahwa perempuan merasa tidak yakin diri atau ragu-ragu untuk mengemukakan ide atau pendapat di depan publik karena merasa takut bahwa gagasan atau pikiran yang akan disampaikan tidak berharga atau bermanfaat.

## **Rangkuman**

Feminisme dapat diartikan suatu paham yang bertekad memperbaiki atau mengubah suatu keadaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dalam masyarakat.

Aliran feminis liberal merupakan perspektif feminis yang berasumsi bahwa subordinasi perempuan terjadi karena adanya keterbatasan budaya dan hukum yang membatasi perempuan dari akses ke sektor publik. Perempuan dianggap memiliki kecerdasan dan kekuatan fisik yang kurang dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, menurut perspektif itu agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki, sistem budaya dan hukum yang menghambat kemajuan perempuan harus diubah. Perempuan harus berpendidikan dan berperan serta dalam kegiatan ekonomi secara sama dengan laki-laki.

Aliran feminis marxis merupakan perspektif feminis yang memandang perempuan merupakan “kelas sosial” tersendiri karena pekerjaan yang mereka lakukan yaitu pekerjaan rumah tangga dan tidak memiliki kesempatan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi.

Aliran feminis radikal merupakan perspektif feminis yang memperhatikan keterbelakangan perempuan dari akarnya, yaitu sistem seks dan gender. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki, yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan perempuan.

Aliran feminis psikoanalisis merupakan perspektif feminis yang bertolak dari teorinya Freud yang menekankan seksualitas adalah unsur yang krusial dalam pengembangan hubungan gender. Adanya perbedaan seksualitas antara laki-laki dan perempuan menyebabkan berbedanya psyche laki-laki dengan perempuan. Perkembangan anak menjadi manusia dewasa harus melalui tahapan perkembangan psikoseksual. Perbedaan temperamen, perilaku, sifat antara laki-laki dan perempuan dewasa adalah hasil dari pendewasaan seksual.

Aliran feminis sosialis berasumsi bahwa hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan atau opresi yang dialami perempuan. Penyebab yang lain adalah sistem patriarki yang masih mengungkung kehidupan perempuan. Feminis sosialis menganggap bahwa keterbelakangan atau opresi perempuan merupakan akibat dari kontrol laki-laki atas kerja produktif dan reproduktif perempuan di rumah (yang didefinisikan secara luas sebagai patriarki), dan akibat dari dominasi kelas dan eksploitasi tenaga kerja perempuan di bawah sistem kapitalis.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan perspektif feminis liberal, perspektif feminis marxis, perspektif feminis radikal, perspektif feminis psikoanalisis dalam menganalisis permasalahan perempuan.
2. Bagaimana pendapat Anda, perspektif feminis yang mana yang tepat dilakukan untuk menganalisis permasalahan perempuan di Indonesia?

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah laporan mengenai hasil analisis pembagian kerja berdasarkan gender dan pengalaman perempuan dalam partisipasinya pada kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan analisis feminis.

### **Daftar Pustaka**

- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought*. Westview Press. Oxford.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Ihromi, TO. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.





---

## **BAB VI**

# PENDEKATAN-PENDEKATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*).
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pendekatan kesamaan (*Equity Approach*).
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pendekatan anti kemiskinan (*Anti-Poverty Approach*).
4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pendekatan efisiensi (*Efficiency Approach*).
5. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pendekatan pemberdayaan (*Empowerment Approach*).
6. Mahasiswa dapat menganalisis pendekatan perempuan yang digunakan dalam program pembangunan.

Pendekatan perempuan dalam pembangunan telah dilakukan sejak awal (tahun 1950-an) dimana proyek-proyek sudah mulai memberikan perhatian kepada perempuan. Dalam perjalanannya, terdapat 5 (lima) pendekatan pembangunan dalam kaitannya dengan perempuan, yaitu pendekatan kesejahteraan,

pendekatan kesamaan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi dan pendekatan pemberdayaan.

### **6.1 Pendekatan Kesejahteraan (*Welfare Approach*), 1950—1970**

Pendekatan ini didasarkan atas 3 (tiga) asumsi, yaitu: (1) perempuan sebagai penerima pasif pembangunan, (2) peran keibuan merupakan peranan yang sangat penting bagi perempuan di dalam masyarakat, dan (3) mengasuh anak merupakan peranan perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Pendekatan ini berakar dari kegiatan misionaris dahulu. Pendekatan tersebut seluruhnya dititik beratkan pada peran reproduktif perempuan dan menempatkan perempuan di ranah domestik, sedangkan laki-laki dipandang sebagai kelompok masyarakat yang aktif di ranah publik.

Proyek-proyek untuk kesejahteraan ini menitikbertakan pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga melalui penyediaan perumahan, sandang atau pangan, dan melalui proyek-proyek latihan mengenai tata laksana rumah tangga, seperti kebersihan, kesehatan, atau memasak. Jenis-jenis latihan itu juga berisi penjelasan-penjelasan tentang makanan bergizi serta cara menyiapkannya sebagai upaya pencegahan kekurangan gizi serta malnutrisi pada anak. Sayangnya tidak banyak yang mementingkan status gizi perempuan itu sendiri. Pendekatan kesejahteraan ini banyak mendapat kritikan karena tidak menentang pembagian kerja seksual, bahkan memperkuat ideologi gender yang memandang perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga (*housewife*) serta menciptakan ketergantungan.

### **6.2 Pendekatan Persamaan (*Equity Approach*), 1975-1985**

Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan

ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif mereka walaupun sumbangan tersebut seringkali tidak diakui. Dengan mengakui sumbangan ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketidaksejajaran perempuan terhadap laki-laki. Program-program yang berdasarkan pendekatan ini langsung diarahkan kepada pada hak-hak yuridis perempuan, termasuk hak perempuan untuk cerai, hak atas anak, hak waris, hak milik harta, hak untuk mendapatkan kredit, dan hak sebagai warga negara untuk menentukan pilihannya atau hak bersuara.

Tuntutan akan “persamaan upah untuk pekerjaan yang sama” merupakan hak ekonomi perempuan yang sangat penting. Kritik terhadap pendekatan ini adalah tidak adanya pembelaan secara politik karena parpol dan serikat buruh biasanya didominasi oleh laki-laki. Sekalipun ada hak-hak resmi perempuan itu ada, seringkali dalam prakteknya diabaikan.

### **6.3 Pendekatan Anti Kemiskinan (*Anti-Poverty Approach*), 1970-an ke atas**

Pendekatan anti kemiskinan merupakan bentuk yang lebih halus dari pendekatan kesamaan karena lembaga-lembaga pembangunan enggan untuk mencampuri hubungan gender yang timpang. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok sasarannya adalah “pekerja yang miskin”. Sektor informal dipandang sebagai sebuah jalan keluar dengan asumsi bahwa sektor informal mampu meningkatkan kesempatan kerja secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pembangunan “pemerataan dengan pertumbuhan” (*redistribution with growth*) dan strategi “kebutuhan dasar” (*basic needs*).

Pendekatan anti kemiskinan untuk perempuan menitikberatkan pada peranan produktif mereka, atas dasar bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi membutuhkan

peningkatan produktivitas perempuan pada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa asal mula kemiskinan perempuan dan ketimpangannya dengan laki-laki diakibatkan oleh kesenjangan peluang untuk memiliki tanah dan modal serta diskriminasi seksual dalam pasar tenaga kerja. Dalam perancangan proyek, kegiatan yang dapat menciptakan penghasilan (*income generating activities*) bagi perempuan diutamakan seolah-olah usaha-usaha skala kecil mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara mandiri.

#### **6.4 Pendekatan Efisiensi (*Efficiency Approach*), pasca 1980**

Pendekatan efisiensi ini telah menggeser tekanan dari perempuan ke pembangunan dengan asumsi bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di negara Dunia Ketiga secara otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan. Perubahan ini, khususnya terjadi di Amerika Latin dan Afrika, di mana masalah-masalah resesi ekonomi diakibatkan jatuhnya harga barang-barang ekspor, proteksionisme, dan beban hutang. Subsidi untuk pelayanan umum dipotong, upah-upah dibekukan, dan tenaga kerja yang tidak efisien dihapuskan. Akibatnya, kompetisi dalam pasar tenaga kerja meningkat. Secara praktis, perubahan-perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya kerja perempuan yang tidak diupah dan perempuan yang menciptakan sendiri pekerjaan di sektor informal. Pada waktu yang bersamaan ideologi tentang perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga semakin diperkuat.

#### **6.5 Pendekatan Pemberdayaan (*Empowerment Approach*), 1975 ke atas terus diselaraskan hingga 1980, populer pasca 1990**

Pendekatan pemberdayaan lahir dari ketidakpuasan terhadap semua pendekatan lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan, beberapa intervensi dari atas, tanpa

disertai upaya meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melakukan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah sendiri situasinya, tidak akan berhasil.

Pendekatan ini berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Ini berarti kesamaan hak ekonomi (peluang untuk menguasai sumber produktif, persamaan upah untuk kerja yang sama, perlindungan hukum ketenagakerjaan), hak-hak resmi yang tidak diskriminatif (perkawinan, perceraian, warisan, hak atas anak serta hak milik asset), dan hak-hak reproduktif dimasukkan dalam agenda.

Pendekatan ini tidak selalu menyibukkan diri dalam proyek-proyek pembangunan, tetapi menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan di Dunia Ketiga. Pendekatan pemberdayaan sebenarnya lebih merupakan sebuah ideologi dan filsafat feminis dari pada suatu petunjuk praktis. Bagaimanapun, istilah pemberdayaan itu sendiri telah banyak dikritik khususnya di kalangan LSM karena dikaitkan dengan ide “mengambil alih kekuasaan”. Padahal, sebenarnya pemberdayaan sama sekali bukan berarti mengambil alih kekuasaan dan menyalin kembali struktur kekuasaan yang lama dengan cara merugikan kaum miskin, melainkan suatu usaha untuk mengubah “corak” kekuasaan itu sendiri ke arah yang lebih adil.

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan, persamaan, antikemiskinan, dan efisiensi dikaitkan dengan teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan perubahan mode di kalangan praktisi pembangunan pada lembaga-lembaga bantuan internasional. Tetapi tanpa “Dasawarsa PBB untuk Perempuan”, pandangan kritis terhadap pembangunan tidak akan mengubah tekanan ke arah hubungan gender seperti yang tercermin dalam pendekatan pemberdayaan.

## Rangkuman

1. Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) menganggap perempuan itu pasif dan penerima pasif dari pembangunan dan lebih banyak memenuhi kebutuhan fisik rumah tangga.
2. Pendekatan persamaan (*equity approach*) menganggap perempuan juga berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan melalui peran produktif dan peran reproduktifnya, dan berupaya menghapus ketidaksejajaran perempuan terhadap laki-laki.
3. Pendekatan anti kemiskinan (*Anti-Poverty Approach*), merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dan berupayan untuk menciptakan penghasilan (*income generating*) bagi perempuan.
4. Pendekatan efisiensi (*efficiency approach*) lebih melihat perempuan sebagai aset yang harus dioptimalkan perannya untuk menghadapi masa resesi ekonomi, dan menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar, serta semakin memperkuat peran domestikasi perempuan, seperti pengasuhan anak, mempersiapkan makanan dan sebagainya.
5. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*) berfokus pada penghapusan subordinasi terhadap perempuan. Pendekatan ini berupaya merubah ideologi yang merugikan perempuan menjadi ideologi yang merubah corak kekuasaan menjadi kekuasaan yang adil bagi perempuan.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan pada pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*).
2. Jelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan pada pendekatan kesamaan (*Equity Approach*).
3. Jelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan pada pendekatan anti kemiskinan (*Anti-Poverty Approach*).
4. Jelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan pada pendekatan efisiensi (*Efficiency Approach*).
5. Jelaskan mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan pada pendekatan pemberdayaan (*Empowerment Approach*).

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah laporan mengenai hasil analisis Anda mengenai pendekatan-pendekatan perempuan yang digunakan dalam terhadap program-program pembangunan.

### **Daftar Pustaka**

- Ihromi, TO. 1995. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.





---

## **BAB VII**

# PERKEMBANGAN STUDI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender.
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan studi perempuan dalam pembangunan menurut WID, WAD dan GAD.
3. Mahasiswa mampu melakukan analisis pendekatan pembangunan WID, WAD dan GAD terhadap program-program pembangunan yang ditujukan untuk perempuan dan mewujudkan keadilan gender.

### **7.1 Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terarah dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Artinya, dalam mengadakan pembangunan, tentunya ada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu. Seiring dengan upaya kaum feminis yang memperjuangkan hak-hak, kepentingan dan

kebutuhan perempuan, maka dalam proses pembangunan pun dianalisis dimana dan bagaimana perempuannya. Ternyata dari beberapa studi, khususnya yang dilakukan Boserup (1970) terhadap pembangunan yang dilakukan pada Tahun 1950-an, memperlihatkan bahwa upaya-upaya pembangunan saat itu dirasakan telah meninggalkan aspek perempuan sebagai manusia. Sejalan dengan perkembangan itu, maka kaum feminis Tahun 1960-an telah berupaya mempelajari dokumen-dokumen yang telah disiapkan PBB, khususnya yang telah disiapkan masing-masing pemerintah yang tidak bersama-sama PBB beserta cabang-cabangnya. Dalam analisis dokumen-dokumen itu ditekankan pada pencarian fakta, deskripsi, analisa dan pembentukan teori tentang subordinasi perempuan. Kemudian muncullah pengintegrasian perempuan ke dalam pembangunan, dimana perempuan harus berpartisipasi secara penuh dalam setiap dimensi dalam masyarakat.

Dalam melihat integrasi perempuan dalam pembangunan digunakan alat analisis dengan model Perempuan dalam Pembangunan (WID), Perempuan dan Pembangunan (WAD) dan Gender dan Pembangunan (GAD). Berdasarkan gender dalam menganalisis model pengintegrasian perempuan dalam pembangunan ini, Moser melakukannya dengan melihat tingkat kebutuhan perempuan yang terpenuhi. Untuk itu, Moser mengembangkan gagasan Molyneux, dengan melihat ada dua (2) tingkatan pemenuhan kebutuhan perempuan dalam pengintegrasian perempuan dalam pembangunan, yaitu kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender.

### **1) Kebutuhan Praktis Gender**

Kebutuhan ini dapat diidentifikasi dengan mudah oleh perempuan dan laki-laki karena selalu berhubungan dengan kondisi kehidupan. Perempuan dapat mengidentifikasi air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai sebagai minat/kebutuhan yang harus segera mereka penuhi. Memenuhi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi

kehidupan, tetapi pemenuhan kebutuhan praktis tidak akan merubah posisi perempuan yang lemah (subordinat), karena dalam prakteknya semakin memperkuat pembagian kerja gender.

## 2) Kebutuhan Strategis Gender

Kebutuhan strategis gender berupaya keras untuk mencapai keadilan gender. Kebutuhan strategis gender adalah semua hal yang oleh perempuan sendiri diidentifikasi sebagai kebutuhan yang disebabkan posisi subordinat mereka. Hal ini berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol, sampai pada eksploitasi karena pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.

Kebutuhan strategis dapat mencakup perubahan-perubahan dalam pembagian kerja gender (perempuan melakukan pekerjaan yang secara tradisional bukan sebagai pekerjaan perempuan, laki-laki mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam pekerjaan domestik dan pengurusan anak), hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/ setara dan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri. Perempuan sendiri tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan ini semudah mengidentifikasi kebutuhan praktis gender. Oleh karena itu dibutuhkan kesempatan khusus untuk melakukannya.

Kebutuhan praktis dan strategis gender harus sama-sama diperjuangkan. Hal ini perlu untuk memadukan antara *bottom-up* dan *top down planning* dalam memformulasikan kebijaksanaan pembangunan. Kebutuhan keduanya harus dilihat tidak sepenuhnya berbeda dan terpisah, tetapi lebih sebagai suatu kebutuhan yang berlanjut seperti dengan memberi konsultasi pada perempuan tentang kebutuhan praktis gender mereka, pada akhirnya bisa menghantar kepada terciptanya kesetaraan gender dimana kebutuhan strategis gender terpenuhi.

## **7.2 Women in Development (WID)**

Ungkapan “Perempuan dalam Pembangunan” yang dikenal dengan singkatan yaitu WID, diciptakan pada awal Tahun 1970-an oleh Women’s Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for Internasional Development sebagai bagian dari strategi cermat untuk membawa pemikiran baru Boserup dan lain-lainnya agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan Amerika. Sejak itu, istilah WID digunakan sebagai pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan kepada paradigma modernisasi. Pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, yang tepat, yang meringankan beban kerja perempuan. WID bertujuan untuk benar-benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan, khususnya penghasil pendapatan, dengan mengabaikan sisi reproduktifnya. Pendekatan ini memperlihatkan asalnya dari kaum Feminis Liberal Utara pada Tahun 1970-an dan 1980-an.

## **7.3 Women and Development (WAD)**

WAD merupakan peralihan dari WID ke GAD, mempunyai pengertian yang lebih luas dari WID. Di dalamnya mengandung ulasan kritis terhadap peranan perempuan dalam pembangunan serta pengaruh kebijakan dan proyek pembangunan terhadap perempuan.

WAD merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul dalam akhir Tahun 1970-an. Pendekatan ini berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada strategi untuk “mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan” melainkan mencoba untuk menunjukkan bahwa perempuan itu selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. WAD mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi

korban dari proses pembangunan yang mengabaikan mereka, tetapi proses itu cenderung mengelompokkan perempuan tanpa menganalisis pembagian kelas, RAS, etnis di antara mereka secara memadai. Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini, pendekatan itu cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, daripada sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan GAD cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

#### **7.4 Gender dan Pembangunan/Gender and Development (GAD).**

Gender dan pembangunan merupakan pendekatan pembangunan terhadap perempuan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, yaitu kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Pendekatan ini juga menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan GAD mempertanyakan teori-teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, yang menegaskan bahwa ada nilai-nilai yang lebih dalam pembangunan, tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi dan penggunaan uang yang efisien, serta menolak bahwa perempuan ingin diintegrasikan ke dalam pembangunan. Pendekatan GAD berbeda dengan pendekatan lainnya dalam analisisnya terhadap asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu berniat mengubah posisi perempuan, khususnya pada Dunia Ketiga. Proses perubahan dan pengaruhnya atas kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunan, seringkali sama dengan perubahan itu sendiri. Pendekatan GAD lebih terkait dengan

pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan daripada pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan perempuan, seperti undang-undang perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang sipil, dan hak atas kekayaan.

Sebagai strategi, pendekatan GAD akan memberikan keuntungan-keuntungan pembangunan yang besar sekali kepada kaum perempuan secara adil dan wajar. Jadi, pendekatan ini sejajar dengan gagasan tentang keadilan pada umumnya, keadilan gender khususnya. Keadilan gender digunakan untuk menyatakan bahwa tidak hanya persamaan antar laki-laki dan perempuan yang dipertaruhkan, karena persamaan tidak menjamin perlakuan perempuan secara adil. Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan agar perempuan dapat menerima keadilan. Keadilan gender dapat dilihat sebagai tekad Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu sila dasar Negara, yaitu Pancasila. Keberhasilan mencapai keadilan gender melalui pendekatan GAD ditentukan oleh adanya kesadaran para perencana, penentu kebijakan, aparat birokrasi nasional, pelaksana pembangunan, dan masyarakat luas akan adanya perbedaan-perbedaan dan ketimpangan gender yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kemauan politik untuk mengambil sikap dalam mengatasi perbedaan-perbedaan dan ketimpangan gender tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pendekatan perempuan dalam pembangunan yaitu WID, WAD dan GAD, maka uraian perbedaan di antara ketiga pendekatan itu, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbedaan Pendekatan WID/WAD dan GAD

Women in Development (WID)/Women and Development (WAD)		Gender and Development (GAD)
Pandangan bahwa yang menjadi sumber permasalahan ada pada perempuan	<b>1. Pendekatan</b>	Pandangan yang menganggap bahwa sumber permasalahan ada pada perempuan
<b>Perempuan</b>	<b>2. Focus</b>	<b>Pola relasi lelaki perempuan</b>
Tidak berperan-sertanya perempuan (1/2 sumberdaya produktif) dalam proses pembangunan	<b>3. Masalah</b>	Ketidak sejaran hubungan kekuasaan (kaya-miskin, perempuan-lelaki) menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperannya perempuan secara maksimal
Pembangunan yang lebih efektif dan efisien	<b>4. Tujuan</b>	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan
Mengintegrasikan perempuan Dalam proses pembangunan	<b>5. Pemecahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat (empower perempuan yang terpinggir/marginal</li> <li>• Mengubah</li> </ul>



		pola-pola hubungan-hubungan yang tidak sejajar
<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyek-proyek untuk perempuan</li><li>• Kegiatan proyek khusus untuk perempuan</li><li>• Proyek-proyek terpadu</li><li>• Meningkatkan produktifitas perempuan</li><li>• Meningkatkan pendapatan perempuan</li><li>• Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mengurus rumah tangga</li></ul>	<b>6. Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana di-definisikan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka</li><li>• Bersamaan dengan itu, ditangani juga kebutuhan strategi pembangunan</li><li>• Menangani kebutuhan strategi golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat</li><li>• Mengacu kepada perubahan struktur</li></ul>

## **Rangkuman**

1. Kebutuhan praktis merupakan kebutuhan jangka pendek yang berupaya berorientasi pada apa yang sangat dibutuhkan perempuan pada waktu dan keadaan dan kondisi saat itu.
2. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang berdampak jangka panjang, merupakan kebutuhan yang mendasar untuk mewujudkan keadilan gender.
3. WID merupakan pendekatan yang memfokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, yang tepat, yang meringankan beban kerja perempuan, dan bertujuan hanya menciptakan pendapatan bagi perempuan, namun mengabaikan sisi reproduktifnya.
4. WAD mempunyai pengertian yang lebih luas dari WID dan mengkritisi peranan perempuan dalam pembangunan serta pengaruh kebijakan dan proyek pembangunan terhadap perempuan. Posisi perempuan lebih dilihat sebagai bagian dari ketidakadilan kelas daripada sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki.
5. GAD merupakan pendekatan pembangunan terhadap perempuan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, yaitu kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Pendekatan ini mencoba untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri perempuan, serta untuk memperbaiki posisi perempuan menjadi berperan aktif di masyarakat, dengan diawali adanya perubahan kesadaran para penentu kebijakan, perencana pembangunan, aparat birokrasi nasional, pelaksana pembangunan, dan masyarakat luas akan adanya perbedaan-perbedaan dan ketimpangan gender yang ada di masyarakat.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender.
2. Jelaskan perbedaan antara pendekatan WID, WAD dan GAD.
3. Jelaskan pendekatan dan kebutuhan yang mana yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah laporan hasil analisis pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender, serta pendekatan pembangunan yang digunakan terhadap program-program pembangunan yang ada.

### **Daftar Pustaka**

- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Ihromi, TO. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

---

## **BAB VIII**

### **PERMASALAHAN/ISU-ISU GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

---

**Tujuan Instruksioanal:**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam pembangunan.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam bidang pendidikan.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam bidang politik.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam bidang ekonomi.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam bidang sosial budaya.
6. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan gender dalam bidang lingkungan hidup.

#### **8.1 Permasalahan/Isu Gender dalam Pembangunan**

Secara umum di dunia, sistem keluarga dan kemasyarakatan didasarkan atas sistem patriarki yang kokoh dengan aplikasinya yang bervariasi dalam tatanan kehidupan masyarakat sehari-sehari. Sistem patriarki ini berdampak pada kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Sistem patriarki ini membagi peran gender dengan pembagian yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan dengan menempatkan laki-laki pada

fungsi di sektor publik dan perempuan di sektor domestik.

Di Indonesia, kondisinya menunjukkan bahwa masih mengalami kesenjangan gender yang relatif besar. Hal ini ditunjukkan dengan:

- 1) Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM).
- 2) Rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam ketenagakerjaan nasional.
- 3) Kesenjangan gender yang dialami perempuan dalam hal komposisi anggota legeslatif dengan kesenjangan partisipasi politik.
- 4) Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai Indeks Pemberdayaan Gender (GEM).
- 5) Mulai munculnya kecenderungan bahwa siswa laki-laki agak tertinggal dibandingkan perempuan baik akses maupun prestasi akademiknya.

Berdasarkan tren jumlah penduduk Indonesia (dari Tahun 2000-2010), diketahui bahwa proporsi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dapat dikatakan hampir seimbang, dengan proporsi laki-laki lebih besar dari perempuan, kecuali proyeksi proporsi penduduk perempuan Tahun 2025, yang relatif lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 50,1 persen dan perempuan 49,9 persen. Pada proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2025, komposisi penduduk perempuan menjadi 50,1 persen dan laki-laki menjadi 49,9 persen.

Pembangunan yang responsif gender diperlukan karena kondisi pembangunan yang dicerminkan dari angka *Human Development Index* (HDI) Indonesia yang relatif rendah antara lain disebabkan karena rendahnya

angka *Gender Development Index* (GDI), yaitu kesenjangan gender kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan yang masih tinggi. Upaya yang dilakukan untuk memperkecil kesenjangan kualitas hidup antara laki-laki dengan perempuan otomatis akan meningkatkan kemajuan kualitas hidup manusia (HDI).

Pada Tahun 2011, posisi Indonesia di antara negara-negara Asia cukup memperhatikan yaitu pada posisi ke-124, sedangkan Singapura pada posisi ke 26, Brunei Darussalam pada posisi ke 33, Malaysia pada posisi ke 61, Srilangka pada posisi ke 97.

Peningkatan dan penurunan GDI seiring dengan peningkatan dan penurunan HDI. Berdasarkan data dari UNDP Report (2011), di Indonesia, Indeks Pembangunan Indonesia (HDI) tingkat provinsi pada Tahun 2007, 2008, dan 2009, menunjukkan tren yang berbeda di antara provinsi, ada peningkatan dan juga penurunan. Namun, data menunjukkan bahwa secara berturut-turut yang merupakan urutan lima tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Urutan lima terendah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (HDI) pada Tahun 2008 dan 2009, secara berurutan adalah Kalimantan Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Kecenderungan terjadinya peningkatan GDI dan GEM, terutama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya angka melek huruf aksara perempuan usia 15 tahun ke atas dari 88,4 persen pada tahun 2006 menjadi 89,2 persen pada tahun 2007.
- 2) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari 48,63 persen pada tahun 2006 menjadi 49,52 persen pada tahun 2007.
- 3) Kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(PTPPO) dan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 4) Rendahnya pencapaian pembangunan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dikarenakan oleh masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan tingkat nasional, terdapat beberapa hal permasalahan gender, yaitu:

- 1) Meskipun terdapat tren positif pada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, yang ditunjukkan oleh tingkat rata-rata pekerja di sektor non-pertanian, partisipasi perempuan secara signifikan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.
- 2) Berdasarkan data Sakernas, jumlah perempuan yang berpenghasilan meningkat dari 22,5 persen di Tahun 2001 ke 33 persen di Tahun 2008. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pekerja perempuan di berbagai bidang (buruh, PNS) antara 8,2 hingga 9,7 juta dari tahun 2005-2008.
- 3) Meskipun peningkatan jumlah pekerja perempuan di berbagai sektor terjadi, tetapi perempuan masih mengalami diskriminasi penghasilan. Upah/rata-rata penghasilan perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian adalah Rp355.136, sedangkan laki-laki menerima upah sebesar Rp715.344.

## **8.2 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Pendidikan**

Permasalahan gender di bidang pendidikan dapat dilihat pada uraian berikut:

- 1) Masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama antar provinsi dan antar kabupaten/kota.
- 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG),

terutama sumber daya manusia dan ketersediaan serta penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.

- 3) Belum optimalnya pemahaman mengenai konsep gender serta isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.
- 4) Mulai munculnya kecenderungan bahwa siswa laki-laki agak tertinggal dibandingkan dengan perempuan baik akses maupun prestasi akademiknya.
- 5) Masih tingginya buta aksara penduduk perempuan dibandingkan laki-laki.
- 6) Dalam akses dan pemerataan pendidikan menunjukkan bahwa indeks paritas gender pada semua tingkat pendidikan menunjukkan kecenderungan yang baik yaitu yang mendekati 1,0. Namun, apabila diteliti lebih dalam lagi, masih terjadi kesenjangan gender terutama pada:
  - a. Kesenjangan dalam perbedaan status sosial ekonomi, latar belakang budaya dan geografis, sehingga mengakibatkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar kesenjangannya.
  - b. Dalam hal mutu pendidikan proses pembelajaran masih netral atau bias gender, hal ini dikarenakan pemahaman guru, kepala sekolah dan pengelola pendidikan belum responsif gender.
  - c. Dalam hasil belajar, angka kelulusan anak perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki sejak Tahun 2005.
  - d. Kualifikasi guru perempuan jauh di bawah laki-laki, hal ini berdampak terhadap hasil sertifikasi di mana guru perempuan jauh tertinggal dibanding guru laki-laki (25 persen berbanding 75 persen)
  - e. Rendahnya partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bidang pendidikan.



Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

- 1) Kurangnya partisipasi (*under-participation*).  
Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.
- 2) Kurangnya keterwakilan (*under-representation*).  
Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
- 3) Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*).
- 4) Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
- 5) Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari

- faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
- 6) Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya *stereotype gender*.
  - 7) Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.
  - 8) Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.
  - 9) Dimensi manfaat adalah sesuatu yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseorang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil.

### **8.3 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Politik**

Di dunia politik, masih nampak dengan terang bahwa laki-laki sangat dominan dari perempuan. Secara kuantitatif, jumlah perempuan yang memasuki kawasan pimpinan di perpolitikan Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun demikian, di akhir-

akhir ini, akses perempuan di dalam politik memang sudah mulai tampak dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan di dalam politik praktis. Sekarang semakin banyak perempuan di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan-jabatan politik lain. Ada beberapa bupati perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian pula gubernur. Bahkan ada bupati perempuan yang bisa menjabat dua kali periode, demikian pula gubernur. Tidak terhitung yang berlama-lama di parpol dan kemudian berlanjut di lembaga legislatif.

Semakin terbuka akses keterbukaan politik, maka tentu akan semakin banyak perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum lelaki di dalam pentas publik. Oleh karena itulah pemberian kuota kepada perempuan di dalam representasi politik tentulah tidak penting. Meskipun begitu, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak tersebut tidak menjamin adanya sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Adanya keterwakilan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini.

Selama ini di Indonesia, kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Oleh karena itu, perlu diperjuangkan bagaimana agar perempuan semakin berdaya di dalam pengembangan SDM terutama melalui pendidikan, sehingga ke depan peluang untuk memasuki dunia politik akan semakin nyata.

Pada dasarnya, kuota 30 persen yang diberikan untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008

tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), masih sangat jauh dengan kenyataannya. Walau sejatinya angka 30 persen ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Namun sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut hal ini sebagai langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langkah politiknya. Karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12 persen saja yang berkiprah dalam ruang sidang di Senayan.

Merupakan fenomena baru dan menyegarkan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, meskipun dalam tataran yang relatif kecil dan sederhana, tetapi masih banyak harapan dan peluang yang bisa dilalui oleh para perempuan dalam partisipasinya untuk mensosialisasikan dan mengimple mentasikan undang-undang tersebut sekaligus sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan perempuan yang selama terpinggirkan oleh sistem. Karena pada kesempatan kali ini, publik akan memberikan penilaian langsung terhadap partai-partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan serta potensi-potensi perempuan, bahkan ada semacam kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya, untuk tidak memilih gambar partai yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan atau dengan tidak merealisasikan Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawa standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan. Dengan adanya dorongan untuk keterwakilan perempuan yang 30 persen di parlemen saat pemilu

2009 tersebut, seperti diamanatkan UU No. 10 tahun 2008, walaupun belum ada affirmative action yang memberikan privilege tertentu, sehingga memberikan syarat yang lebih mudah bagi caleg perempuan dari pada caleg laki-laki, namun hasil dari pemilu tersebut sudah menunjukkan keterwakilan yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu untuk DPR RI 18 persen dari sebelumnya yang hanya 12persen dan untuk keterwakilan di DPD agak lebih tinggi dari pada keterwakilan di DPR, yaitu 27,3 persen dari sebelumnya 18,8 persen.

Kurangnya pengakuan terhadap pentingnya peran perempuan dalam proses politik, telah terbukti dengan kurang terakomodirnya permasalahan perempuan dalam perencanaan pembangunan, meskipun sejak lama sudah dikampanyekan mengenai gender mainstreaming tentang perempuan sebagai bagian dan sasaran dalam pembangunan pada tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan “Women In Development Approach (WID)”.

#### **8.4 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Ekonomi**

Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi sangat terikat dengan perubahan struktur ekonomi yang telah membuka peluang baru bagi kaum perempuan dalam berbagai pekerjaan. Namun, keterlibatan ini justru menghasilkan kesenjangan gender karena perusahaan yang berorientasi pada perolehan keuntungan besar, membutuhkan tenaga perempuan untuk menekan biaya produksi. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tidak membutuhkan keahlian yang profesional. Mereka hanya dibutuhkan sebagai tenaga kasar yang tidak perlu berpikir.

Sebagai salah satu dampak dari pembangunan, maka dalam memahami kondisi kerja perempuan diperlukan analisis yang lebih seksama tentang proses pembangunan, terutama kemiskinan dan struktur pasar

kerja. Hal ini difungsikan sebagai salah satu kerangka berfikir guna memahami ketimpangan-ketimpangan pasar kerja dalam prespektif gender. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja merupakan tuntutan proses pembangunan. Angkatan kerja perempuan memasuki wilayah publik adalah hal yang tidak bisa dielakkan lagi dalam proses modernisasi.

Hal ini berdampak pada terlibatnya perempuan dalam sektor publik secara besar-besaran seperti halnya bekerja di pabrik, bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja apa saja yang dapat mendatangkan uang. Fenomena ini merupakan salah satu dampak dari meningkatnya kebutuhan akan uang. Namun, realitas menunjukkan bahwa upah kerja kaum perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan pandangan bahwa ada diskriminasi terhadap pekerja perempuan di pasar kerja. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa meskipun arus perempuan mulai meninggalkan kerja-kerja domestik dan memasuki sektor publik sebagai bentuk kepedulian atas perekonomian keluarga meningkat tajam, tetapi status dan nasib pekerja perempuan relatif tidak mengalami perubahan.

Adapun permasalahan/ isu gender dalam pembangunan ekonomi antara lain:

- 1) Angkatan kerja perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki : (P = 45,47 persen < L = 81,19 persen).
- 2) Upah/gaji yang diterima pekerja perempuan jauh lebih rendah dari yang diterima pekerja laki-laki (pedesaan dan perkotaan).
- 3) Tingkat pengangguran terbuka pada perempuan lebih besar dari laki-laki (P = 7,50 persen, L = 6,7 persen) di pedesaan dan perkotaan.
- 4) Curahan waktu kerja perempuan untuk kegiatan produksi maupun reproduksi lebih besar dibandingkan suami.

- 5) Jabatan pada tataran manajemen di perusahaan negara maupun swasta didominasi karyawan laki-laki.
- 6) Sistem panen yang dilakukan dengan “sistim tebasan” menyebabkan buruh tani perempuan kalah bersaing dengan buruh laki-laki.
- 7) Bagi buruh perempuan yang ikut bekerja dengan suami, biasanya tercatat sebagai pekerja tapi tidak menerima upah secara langsung karena upah diterima oleh suami.
- 8) Posisi perempuan di perusahaan/pabrik umumnya mendominasi pekerjaan sebagai buruh.

Fenomena ini bisa dianggap sebagai buah hasil dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam struktur subordinasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Struktur yang timpang, yang menempatkan laki-laki pada ujung yang satu dan perempuan di ujung yang lain dalam suatu garis vertikal, telah membedakan wilayah ekspresi di mana laki-laki dan perempuan terlibat. Perbedaan pekerjaan semacam ini telah memberi basis kekuasaan kaum laki-laki, yang secara langsung menegaskan superioritas laki-laki dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Mencermati fenomena tersebut di atas, maka secara garis besar ketimbangan tersebut dapat dipahami bahwa hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan marginal yang dikerjakan oleh perempuan dapat dilihat sebagai akibat dari proses identifikasi perempuan terhadap apa-apa yang sesuai dengan sifat keperempuanan seperti yang sudah dikonstruksikan secara sosial. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi yang marginal itu merupakan sebuah proses interaksi dan negosiasi yang dilakukan oleh perempuan sendiri. *Kedua*, berbagai proses telah memproduksi sifat keperempuanan dan kenyataan-kenyataan tentang pekerjaan yang sesuai dengan sifat keperempuanan tersebut. Tingkat absensia perempuan yang tinggi (perempuan butuh cuti hamil dan melahirkan) sering kali dijadikan sebagai alasan untuk

tidak memilih tenaga kerja perempuan atau untuk menempatkan perempuan pada pekerjaan marginal.

Dua penyebab yang sangat mendasar tersebut memberikan pemahaman pada kita bahwa ketimpangan gender sesungguhnya ditegaskan secara terus menerus oleh struktur sosial yang patriarki, laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung “mengalah” kepada suami dalam suatu struktur hubungan. Tindakan ini merupakan tindakan pemeliharaan yang harmonis yang sekali lagi menegaskan bahwa perempuan tidak memandang kegiatan ekonomi sebagai dunia perempuan. Dunia perempuan tetap rumah tangga sehingga menjadi perempuan ideal adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Oleh karena itu, peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar diberbagai sektor kegiatan. Kesenjangan gender dibidang ekonomi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan kesempatan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini diperparah dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang sensitif dan responsif gender.

Contoh pengimplementasian Pasal 11 konvensi perempuan yang jelas diratifikasi berdasarkan UU No.7/1984. Pasal 11 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi: hak untuk bekerja, hak untuk memilih profesi, hak untuk menerima upah yang sama, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

### **8.5 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Lingkungan**

Contoh pertama permasalahan gender dalam bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dari kuisisioner yang diedarkan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi



Jambi. Diketahui bahwa permasalahan gender yang berarti dalam bidang lingkungan hidup tidak ada. Namun bila perempuan terlibat dalam perusakan dan pencemaran lingkungan, semua itu disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka mengatasi kesulitan hidup serta ketergantungan ekonomi dan social terhadap kaum laki-laki. Pada dasarnya dari hasil pengamatan di bidang penghijauan, limbah rumah tangga dan sebagainya, perempuan relatif lebih sadar lingkungan dibandingkan kaum laki-laki. Secara sistematis identifikasi permasalahan gender dalam bidang lingkungan hidup di Propinsi Jambi sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesempatan perempuan untuk mengakses informasi terhadap bahaya kerusakan lingkungan dan pencemaran yang berasal dari pestisida, B3, polusi udara dan air.
- 2) Masih dijumpai perempuan yang ikut terlibat dalam pengrusakan lingkungan seperti pembakaran hutan dan perladangan berpindah. Selain itu keterlibatan perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup sangat besar. Hal itu terlihat dari kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan PKK, perempuan terlibat dalam kegiatan Tanaman Obat Keluarga dan dapur hidup. Diorganisasi PKK pun ada seksi lingkungan hidup yang bertugas melestarikan lingkungan hidup sekitar mereka.
  - b. Kegiatan kalpataru, kaum perempuan banyak terlibat secara langsung atau ikut membantu kaum laki-laki sebagai penyelamat lingkungan, perintis lingkungan dan pengabdian lingkungan.
  - c. Kegiatan penghijauan dan reboisasi, perempuan terlibat dalam penanaman kembali hutan yang sudah mengalami kerusakan.
  - d. Kegiatan sanitasi lingkungan, perempuan banyak berperan dalam pengelolaan lingkungan rumah tangga, sesuatu yang tidak sempat dilakukan/diabaikan oleh kaum laki-laki.

Contoh kedua permasalahan dan isu gender yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam perairan. Air merupakan kebutuhan pokok penduduk sehari-hari, sehingga dapat dikatakan penduduk tidak dapat hidup tanpa air. Secara umum, air diperlukan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, industri, pembangkit listrik, pertanian, dan sebagainya. Dalam rumahtangga, air digunakan untuk air minum, memasak, mencuci, mandi, membersihkan rumah seperti mengepel atau mencuci kendaraan dan untuk keperluan lain. Pada kondisi tertentu kebutuhan air untuk kegiatan domestik yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan kurang mendapatkan porsi yang cukup. Perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam dalam pemenuhan kebutuhan air. Di sisi lain perempuan selalu dianggap sebagai bagian pencemar air melalui limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik.

Permasalahan/isu gender yang sering terjadi dalam bidang Sumber Daya Air antara lain:

- 1) Rendahnya akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Sumber Daya Air di berbagai tingkatan mulai dalam rumah tangga sampai tingkat nasional dan internasional.
- 2) Akses dan control perempuan yang tidak adil pada pendidikan, informasi, pelatihan, modal, lahan, dan teknologi tentang sumber daya air.
- 3) Adanya ketidakadilan dalam menikmati manfaat pembangunan Sumber Daya Air. Perempuan mendapatkan beban yang lebih besar dalam pelestarian dan dampak kerusakan lingkungan akibatnya, dampak negatif degradasi sumberdaya air pada perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Alasan wanita lebih rentan terkena penyakit yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan. Keterkaitan perempuan dalam lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena perempuan dapat mempengaruhi gaya hidup keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Perempuan dalam kesehariannya cenderung lebih dekat dengan

lingkungan, seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah rumah tangga, merawat kebun, dsb. Apalagi perempuan yang berada di pedalaman, umumnya mereka mempunyai pengetahuan turun temurun mengenai tanaman obat dan kearifan lingkungan. Perempuan juga mempunyai kemampuan lebih untuk menggerakkan masyarakat, sehingga membuat perempuan berpotensi untuk gerakan lingkungan.

Namun, perempuan juga banyak memiliki masalah dengan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya penggunaan zat-zat kimia dalam rumah tangga, bahkan sampai pada masalah kecantikan. Kurangnya akses perempuan pada berbagai informasi tentang lingkungan hiduplah yang membuat perempuan berpotensi untuk merusak lingkungan dengan ketidaktahuannya. Sehingga perempuan menjadi lebih rentan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Apa yang dapat dilakukan perempuan untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan?

1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Secara aktif.

Perempuan dapat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara memisahkan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya. Sampah dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan nonorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan oleh alam (proses penguraiannya memerlukan waktu singkat). Contohnya adalah sisa makanan dan sayuran. Sampah nonorganik adalah sampah yang sulit teruraikan oleh alam (proses penguraiannya memerlukan waktu lama). Contoh sampah nonorganik adalah plastik. Penanganan yang paling sesuai bagi sampah nonorganik adalah daur ulang (recycle) dan pemakaian ulang (reuse)

2) Produk Rumah Tangga Ramah Lingkungan.

Perempuan memiliki peran dengan menentukan produk rumah tangga yang ramah lingkungan. Untuk

memilih produk rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memilih produk pembersih yang menggunakan bahan aktif biodegradable. Bahan ini termasuk dalam kategori ramah lingkungan karena dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Kedua, menghindari produk yang mengandung merkuri. Merkuri merupakan logam berbahaya yang sering ditambahkan dalam beberapa produk, seperti kosmetik, cat, dan baterai.

- 3) Pemilihan alat-alat rumah tangga yang ramah lingkungan.

Dalam memilih peralatan rumah tangga, utamakan untuk produk yang hemat energi. Sebaiknya, pilih juga alat pendingin (AC, kulkas) non-CFC karena bahan tersebut berpotensi merusak ozon.

- 4) Pendidik Lingkungan.

Seorang perempuan atau ibu merupakan media edukasi pertama bagi anak-anak. Melalui ibu, pendidikan dan penyadaran mengenai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dari penerapan pola pengelolaan sampah dan pemilihan produk yang ramah lingkungan yang dilakukan dalam sebuah keluarga, anak akan ikut terbiasa dalam menjaga lingkungannya. Dan jika nantinya kebiasaan dan kesadaran ini mengakar dalam diri anak-anak, maka pada masa depan akan terbentuk generasi yang peduli pada lingkungan.

## **8.6 Permasalahan/Isu Gender dalam Bidang Sosial Budaya.**

Permasalahan gender dalam bidang sosial budaya dalam masyarakat pertanian di Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan bahwa perempuan memiliki pengalaman dalam berusaha tani, namun tidak diikuti dengan lamanya pengalaman perempuan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Kesenjangan

gender tidak hanya terjadi pada pendidikan formal tetapi juga pada pendidikan nonformal (kegiatan penyuluhan pertanian). Selama satu tahun, hanya ada sebanyak 6,67 persen perempuan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dengan rata-rata frekuensi kehadiran perempuan hanya sebanyak 0,07 kali. Kehadiran perempuan pada kegiatan penyuluhan pertanian itu juga tidak sengaja diundang oleh PPL melainkan karena pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan di rumah kerabat keluarga di sebelah rumahnya. Hal ini dikarenakan perempuan tani bukan anggota kelompok tani. Hubeis (2012) mengatakan bahwa pengelompokan petani yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin akan membatasi perempuan tani terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain itu, perempuan lebih banyak berperan pada kegiatan kemasyarakatan dibandingkan dengan laki-laki yaitu seperti pengajian, banjar, gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan laki-laki adalah kegiatan menghadiri rapat/pertemuan di desa dan sebagai tenaga kerja baik sebagai tukang maupun peladen pada pembuatan sumur, talut jalan, dan drainase yang mendapatkan bayaran/upah. Kegiatan yang dilakukan perempuan adalah kegiatan yang tidak mendapatkan bayaran/upah yaitu menyiapkan makanan dan minuman bagi para pekerja, serta mengangkat material bangunan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan kemampuan fisik dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan, proses marginalisasi terhadap perempuan, serta stereotype gender bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga. Kegiatan pengajian yang lebih banyak dilakukan perempuan terkait dengan adanya harapan masyarakat dan keyakinan diri perempuan itu sendiri bahwa perempuan haruslah memiliki moral yang baik, perempuan haruslah menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya.

Selain itu, keterlibatan perempuan pada kegiatan kelompok tani (KT), kelompok wanita tani (KWT) dan PKK adalah sangat rendah. Hal ini dikarenakan anggota kelompok tani adalah hanya laki-laki sebagai kepala

keluarga. Perempuan yang terlibat dalam kegiatan KWT hanya perempuan di Desa Bebuak. Di ketiga desa, perempuan tidak terlibat dalam kegiatan PKK dikarenakan keberadaan organisasi perempuan (PKK) di desa selama ini dipandang belum berperan dalam pelaksanaan program peningkatan peranan dan kemampuan perempuan. Hal ini dikarenakan, mengacu pada pendapat Setiawan (2012) dan Sumardjo (2012), organisasi perempuan (PKK) belum mampu berfungsi sebagai penghantar (katalis) inter dan antara masyarakat desa dan dengan masyarakat luar desa, dan dapat dimanfaatkan secara fungsional oleh pelaksana pembangunan di desa. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pengembangan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok/individu seperti PKK, dasawisma, atau organisasi *grassroots* yang telah terbentuk (Ariningsih dan Rachman 2008; Ibnouf 2009; Hubeis 2012). Perlu juga dilakukan upaya pengembangan kemampuan berkomunikasi bagi pengurus dan anggota PKK, dasawisma dan organisasi lainnya agar mereka mampu berperan sebagai pendamping, mampu berkomunikasi dan meneruskan kembali informasi yang diterima dari pelaksana pembangunan kepada perempuan tani lain secara kelompok (Hayati 2014).

## **Rangkuman**

Permasalahan /isu gender dalam pembangunan terdapat di berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, sosial budaya. Permasalahan/isu gender yang ada adalah beban ganda, stereotipe gender, marginalisasi, subordinasi, dan diskriminasi. Adapun kesenjangan gender yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) dan indeks pembangunan gender (GDI).

2. Permasalahan gender di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: kurangnya partisipasi (*under-participation*), kurangnya keterwakilan (*under-representation*), perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*), dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai, dimensi proses pembelajaran, dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat, dimensi kontrol, dan dimensi manfaat.
3. Kesenjangan gender yang dialami perempuan dalam hal komposisi anggota legislatif dengan kesenjangan partisipasi politik.
4. Rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam ketenagakerjaan nasional.
5. Permasalahan gender dalam bidang sosial budaya pada masyarakat pertanian menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang rendah terhadap informasi perempuan, rendahnya partisipasi perempuan dalam kelembagaan lokal yang ada.
6. Permasalahan gender di bidang lingkungan, seringkali perempuan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan disebabkan karena ketidakberdayaannya menghadapi kesulitan hidup serta ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap laki-laki. Selain itu, karena kurangnya akses perempuan terhadap informasi.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan permasalahan gender yang terjadi di Indonesia dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang lingkungan hidup.
2. Jelaskan penyebab kesenjangan gender yang terjadi di Indonesia.

## **Tugas Terstruktur**

Buatlah artikel mengenai permasalahan gender di berbagai bidang pembangunan di Provinsi NTB serta bagaimana solusinya.

## **Daftar Pustaka**

- Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. IPB Press. Bogor.
- Hayati. 2014. *Participation of Female Farmers in Achieving Household Food Security*. *Asian Journal of Agricultural and Food Sciences (AJAFS)*, Vol.2, No. 6. ISSN: 2321 – 1571. *Asian Online Journals* ([www.ajouronline.com](http://www.ajouronline.com))
- Hayati. 2016. *Peran Gender dan Penyuluhan dalam Adaptasi Perubahan Iklim Di Kawasan Das Renggung Kabupaten Lombok Tengah*
- Setiawan I. 2012. *Dinamika Pemberdayaan Petani: Sebuah Refleksi dan Generalisasi di Jawa Barat*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Sumardjo. 2012. *Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian*. Di dalam *Merevolusi Revolusi Hijau*. *Pemikiran Guru Besar IPB*. Bogor: IPB Press.
- Ariningsih E, Rachman HPS. 2008. *Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan*. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* 6(3): 239-255. DOI: [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com\\_content &task=view&id=537&Itemid=60](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content &task=view&id=537&Itemid=60)
- Hubeis AV. 2012. *Relasi Gender dan Ketahanan Pangan*. Di dalam: *Merevolusi Revolusi Hijau*. *Pemikiran Guru Besar IPB*. Bogor (ID): IPB Press.
- Ibnouf FO. 2009. *The role of women in providing and improving household food security in Sudan: Implication for reducing hunger and malnutrition*. *Journal of International Women's Studies* 10(4)



[Internet]. [diunduh 21 Maret 2012]. Tersedia pada:  
[www.bridgew.edu/.../SudanFoodSecurity.pdf](http://www.bridgew.edu/.../SudanFoodSecurity.pdf) .

Fakih, Mansour. 2013. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

---

# **BAB IX**

## **TEKNIK ANALISIS GENDER**

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memilih tehnik analisis gender
2. Mahasiswa dapat menganalisis data gender berdasarkan metoda Harvard, Moser, kerangka pemampuan perempuan (Sara H Longwe), dan GAP

### **9.1 Model Harvard**

Teknis analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama dengan Kantor Women In Development (WID) - USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal.

Tujuan Kerangka Harvard :

- 1) Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional.
- 2) Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.

- 3) Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
- 4) Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

Dalam model ini ada 4 (empat) kategori yang dianalisis

- 1) Profil kegiatan
  - 2) Profil akses dan kontrol
  - 3) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol
  - 4) Analisis siklus proyek
- 1) Profil Kegiatan

Digunakan untuk melihat:

- ✓ “Siapa melakukan apa”, When, How, Where, How Often
- ✓ Sebanyak mungkin peran/karakteristik (laki-laki/perempuan, tua/muda, kawin/tidak kawin, dll)

*Profil kegiatan dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk:*

- a. Peran/kegiatan produktif adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga sebagai kegiatan ekonomi karena menghasilkan uang atau barang secara langsung.

Misalnya:

- Bertani, berkebun, berternak, menangkap ikan untuk dijual,
- Berdagang, kerajinan tangan, dll.

- b. Peran/kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung.

- c. Kegiatan politik dan sosial budaya, yaitu kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang ataupun tidak.

Ada 4 (empat) Parameter untuk melukiskan kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu :

- a. Dominasi Gender dan Umur – mengidentifikasi apakah perempuan, laki-laki dan anak-anak mereka atau anggota keluarga lainnya yang melaksanakan suatu kegiatan, yaitu untuk mengungkapkan pola relasi gender dalam kegiatan kerja dan untuk mengidentifikasi dampak gender yang ditimbulkan.
- b. Alokasi Waktu – melukiskan persentase waktu yang dialokasikan bagi setiap kegiatan dan melukiskan apakah kegiatan tersebut musiman atau harian.
- c. Lokasi Kegiatan – melukiskan dimana kegiatan itu dilaksanakan; di rumah, di sawah, di pasar kebun keluarga atau di masyarakat; melukiskan mobilitas perempuan dan memberikan petunjuk tentang sifat-sifat dan cara-cara pendekatan pelayanan proyek.
- d. Pendapatan – melukiskan jumlah uang yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu kegiatan. Perhitungan dapat disesuaikan menurut jenis kegiatan, misalnya : per jam, per hari, per bulan, per musim dan sebagainya.

Tabel 4. Profil Kegiatan.

Kegiatan	Gender/Usia				Waktu	Lokasi	Pendapatan
	Perempuan Dewasa	Laki-laki Dewasa	Anak Perempuan	Anak Laki-laki			
1. ....							
2. ....							
3. ....							

Dengan demikian, proses pengidentifikasian kegiatan berdasarkan gender melalui profil kegiatan ini akan diketahui secara tepat tentang peranan, kegiatan sekaligus kebutuhan pria maupun perempuan dalam satu unit keluarga dan masyarakat.

## 2) Profil Akses dan Kontrol.

Merinci sumber-sumber apa yang diketahui oleh pria dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil ini merupakan kunci yang menentukan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.

Tabel 5. Profil Akses dan Kontrol

Kegiatan	Akses		Kontrol	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1. ....				
2. ....				
3. ....				

**Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol** – berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender, akses serta kontrol yang berkaitan dengan gender terhadap sumber-sumber dan manfaat. Analisis disini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan kesempatan bagi partisipasi pria dan perempuan dalam proyek maupun bagi penikmatan hasil-hasil proyek. Karena pekerjaan yang dilakukan pria dan perempuan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat proses pembangunan atau perubahan-perubahan, maka pengertian tentang kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis ini.

**Analisis Siklus Proyek**, terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis tersebut terdahulu. Prosesnya, yaitu menanyakan kegiatan-kegiatan mana yang akan **dipengaruhi** oleh proyek dan bagaimana permasalahan dan kontrol terkait yang merupakan penghubung bagi terwujudnya dampak proyek pada perempuan. Analisis ini membantu menunjukkan bagian-bagian proyek yang perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa aspek dalam siklus proyek perlu dipertanyakan secara rinci, yaitu :

- **Analisis Keadaan**, yang menentukan kategori pokok analisis "gender" dalam mengidentifikasi masalah dan potensi kelompok dalam kasus KUD di Jawa Barat, digunakan matriks berikut :

Tabel 6. Analisis Keadaan dari Kasus KUD di Jawa Barat.

Uraian	Keadaan yang ada	Keadaan yang semestinya	Alasan penyimpangan	Potensi yang ada	Tindakan yang perlu
1. Pembagian Kerja					
2. Akses dan Kontrol					
3. Partisipasi dalam kelembagaan					

- **Perencanaan Proyek**, Penerapan Kerangka Logis Rancangan Proyek (KLRP) dalam perencanaan dapat dilihat dalam contoh Perencanaan Proyek dalam Kasus KUD tersebut pada Tabel 4.

Tabel 7. Perencanaan Proyek dari Kasus KUD di Jawa Barat.

	Indikator *	Asumsi *	Sumber Pembuktian *
<p><b>Tujuan Umum :</b> Pria dan perempuan berpartisipasi dalam KUD secara seimbang</p> <p><b>Tujuan Proyek :</b> Terintegrasi kelompok simpan pinjam perempuan sebagai unit KUD</p> <p><b>Hasil Kegiatan :</b> Kelompok simpan pinjam sudah memenuhi peraturan untuk unit KUD dan bisa memanfaatkan fasilitas KUD</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendiskusikan keuntungan dan kesulitan untuk menjadi unit KUD dan mencapai konsensus mengenai integrasi dengan KUD</li> <li>2.</li> </ol>			

- Implementasi proyek
- Pemantauan dan evaluasi.

Penggunaan kerangka Analisis Harvard :

- Lebih cocok untuk perencanaan proyek dibandingkan dengan perencanaan program atau kebijakan.
- Dapat digunakan sebagai "titik masuk" (entry point) gender netral, ketika melontarkan isu gender kepada



peserta yang resisten terhadap adanya ketimpangan dalam relasi gender.

- Untuk menyimpulkan data basis atau data dasar.
- Digunakan bersamaan dengan kerangka Analisis Moser untuk mencari gagasan dalam menentukan kebutuhan strategik gender.

## **9.2 Model Moser**

Teknik analisis model Moser atau disebut Juga Kerangka Moser, didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat "teknis dan politik". Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu "debat".

Ada 6 alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan untuk semua tingkatan, dari proyek sampai ke perencanaan daerah.

### **1) Alat 1: Identifikasi Peranan Gender ("Tri Peranan")**

Seperti halnya Kerangka Harvard, alat ini mencakup penyusunan pembagian kerja gender/pemetaan aktivitas laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan dan anak laki-laki) dalam rumah tangga selama periode 24 jam.

Disamping itu, yang dimaksud dengan "tri peranan" dalam Moser, adalah sama dengan kerangka Harvard, membagi peranan perempuan yang berpendapatan rendah ke dalam peranan "*Produktif*", "*reproduktif*" dan "*kemasyarakatan*" atau "*kerja sosial*".

### **2) Alat 2: Penilaian Kebutuhan Gender**

Moser mengembangkan alat ini dari konsep minat/kebutuhan gender dari sudut perempuan yang pertama kalinya dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki karena "tri peranan" mereka sebagaimana posisi subordinat mereka terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut dibedakan kedalam minat/kebutuhan praktis gender dan strategis gender.

**3) Alat 3: Pendisagregasian (pemisahan) kontrol atas sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumberdaya intrarumah tangga dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga).**

Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumberdaya dalam rumah tangga, siapa yang mengambil keputusan penggunaan sumberdaya dan bagaimana keputusan itu dibuat.

**4) Alat 4: Menyeimbangkan peranan**

Sangat berhubungan dengan bagaimana perempuan mengelola keseimbangan antara tugas-tugas produktif, reproduktif dan kemasyarakatan mereka. Termasuk mempertanyakan tentang "Apakah suatu intervensi yang direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan pada satu peranan dengan konsekuensi terhadap peranan perempuan lainnya"?

**5) Alat 5: Matriks Kebijakan WID (Women InDevelopment) /GAD (Gender And Development)**

Matriks kebijakan Women In Development (WID)/Gender and Development (GAD) memberikan suatu kerangka untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang sedang (atau dapat) digunakan untuk ditujukan pada tri peranan, serta kebutuhankebutuhan praktis dan strategis gender pada perempuan dalam proyek dan program. Matriks ini dibedakan kedalam 5 pendekatan.

**a. Kesejahteraan**

Pendekatan ini ditujukan untuk membawa perempuan ke dalam pembangunan agar menjadi ibu yang lebih baik. Selama ini perempuan dipandang sebagai penikmat pasif pembangunan. Pendekatan ini mengakui peranan reproduktif perempuan dan berusaha memenuhi kebutuhan praktis gender (KPG) melalui suatu uluran bantuan yang bersifat dari atas

(top down), berupa pangan, ukuran-ukuran untuk mengatasi malnutrisi dan keluarga berencana. Pendekatan ini tidak menantang (tidak menimbulkan konflik), karenanya masih sangat populer.

**b. Keadilan**

Pendekatan WID yang pertama, muncul pada dekade 1976-1985, dalam konteks paradigma pembangunan "*Pertumbuhan dengan keadilan*". Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh keadilan bagi perempuan yang dipandang sebagai partisipan aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini mengakui tri peranan, dan berusaha memenuhi kebutuhan strategis gender (KSG) melalui intervensi langsung pemerintah dengan memberikan otonomi politik dan ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki. Pendekatan ini menantang subordinasi perempuan. Pendekatan ini dikritisi sebagai feminisme barat, dianggap mengancam dan tiak populer dikalangan pemerintah.

**c. Anti-Kemiskinan**

Merupakan pendekatan WID kedua, diadopsi sejak tahun 1970-an dan merupakan kebalikan dari versi keadilan, menggunakan konteks pendekatan "*kebutuhan dasar terhadap pembangunan*". Tujuannya untuk menjamin agar perempuan miskin meningkat produktivitasnya. Kemiskinan perempuan dianggap sebagai suatu masalah keterbelakangan, bukan karena subordinasi. Pendekatan ini mengakui peranan produktif perempuan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis untuk memperoleh pendapatan, khususnya dalam proyek-proyek peningkatan pendapatan berskala kecil.

**d. Efisiensi**

Pendekatan WID ketiga dan sekarang menjadi pendekatan yang utama, diadopsi sejak krisis hutang tahun 1980. Pendekatan ini bertujuan untuk me-

mastikan bahwa pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif melalui kontribusi ekonomi perempuan, dimana partisipasi sering disamakan dengan keadilan. Pendekatan ini berusaha untuk memenuhi KPG dengan mengandalkan pada tri peranan dan konsep waktu perempuan yang elastis. Pada prinsipnya perempuan dipandang dalam kaitannya dengan kapasitas mereka untuk mengkompensasi bagi menurunnya pelayanan sosial dengan memperpanjang hari kerja mereka. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang populer.

**e. Pemberdayaan**

Pendekatan yang mutakhir, diartikulasikan oleh perempuan dunia ketiga. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui kepercayaan diri yang lebih besar. Subordinasi perempuan diekspresikan tidak hanya disebabkan oleh dominasi laki-laki, tetapi juga karena penindasan kolonial dan neo-kolonial.

Pendekatan ini mengakui tri peranan dan berusaha memenuhi KSG secara tidak langsung melalui mobilisasi KPG dan bawah. Pendekatan ini secara potensial menantang, meskipun penghindarannya dan feminisme barat membuat pendekatan ini tidak populer, kecuali di kalangan LSM perempuan di negara ketiga.

**6) Alat 6 : Melibatkan Perempuan, Organisasi Penyadaran Gender dan Perencana dalam Perencanaan.**

Tujuan dan alat ini untuk memastikan bahwa KPG dan KSG diidentifikasi dan dijamin sebagai "kebutuhan-kebutuhan nyata" perempuan, berlawanan dengan pengertian atas kebutuhan-kebutuhan yang digabungkan ke dalam proses perencanaan selama ini.

## **Kegunaan dan Keterbatasan Kerangka Analisis Gender model Moser**

- **Kegunaan**

Kerangka Moser telah dianjurkan secara meluas dan dapat digunakan untuk perencanaan dengan beragam latar belakang, dari LSM sampai ke sektor-sektor dalam pemerintahan. Diakui bahwa mungkin ada resistensi secara kelembagaan dan politik dalam mengarahkan dan mentransformasi hubungan-hubungan gender. Pendekatannya untuk perencanaan menantang relasi gender yang tidak setara dan mendukung pemberdayaan perempuan. Konsep KPG dan KSG merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengevaluasi dampak suatu intervensi pembangunan terhadap relasi gender. Konsep tri peranan berguna dalam membuka pikiran mengenai rentang yang luas atas pekerjaan dimana perempuan terlibat. Lebih jauh, konsep tersebut mengingatkan para perencana terhadap keterhubungan antara peranan-peranan reproduktif, produktif dan kerja sosial.

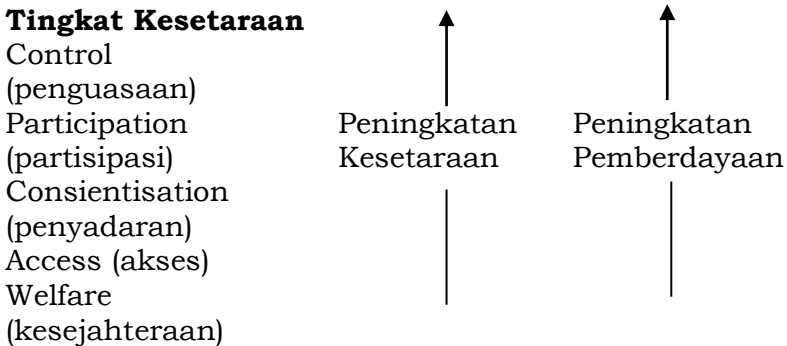
- **Keterbatasan**

Kerangka kerja ini melihat pada pemisahan aktivitas-aktivitas perempuan dan laki-laki ketimbang melihat tentang bagaimana aktivitas tersebut saling berhubungan. Tidak setiap orang menerima konsep tri peranan, khususnya dalam kaitannya dengan peranan komunitas (masyarakat). Bentuk-bentuk lain dari ketidaksetaraan seperti halnya ras dan kelas, tidak diperhatikan. Beberapa orang juga menyatakan bahwa pembagian tugas antara kebutuhan-kebutuhan strategis dan praktis tidak membantu, karena sebenarnya seringkali ada keberlangsungan dari kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis.

### 9.3 Kerangka Pemampuan Perempuan (Sara H Longwe)

Jika isu pokok dalam pelibatan perempuan dalam pembangunan adalah pemberdayaan perempuan, ada lima kriteria untuk menilai apakah terjadi pemberdayaan perempuan di bidang kehidupan sosial ekonomi seperti yang tercantum pada bagan berikut ini.

#### Kriteria Pemberdayaan Perempuan



Pada bagan di atas terlihat bahwa tingkat kesetaraan dapat dilihat dari lima tingkat kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi, dan penguasaan. Tingkat-tingkat kesetaraan itu berada dalam hubungan yang hirarki. Oleh karena itu, kesetaraan dalam penguasaan adalah yang terpenting. Makin tinggi kesetaraan makin besar pemberdayaan yang dicapai oleh perempuan. Suatu situasi sosial akan menjadi isu perempuan apabila salah satu tingkat kesetaraan di atas mengalami permasalahan dan situasi sosial akan menjadi isu yang lebih serius manakala hal tersebut terjadi pada tingkat kesetaraan yang lebih tinggi, dan merupakan isu yang sangat mendasar apabila terjadi pada tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Adapun penjelasan dari kelima tingkat kesetaraan itu adalah sebagai berikut:

#### 1) Tingkat Kesejahteraan (*welfare*)

Sejauhmana terjadi kesetaraan kesejahteraan materi bagi perempuan dibandingkan laki-laki dalam hal

status gizi, kesehatan, kecukupan pangan dan pendapatan. Jika kaum perempuan adalah produser yang aktif dan kreatif dalam pemenuhan kesejahteraan materi bagi dirinya, maka perempuan mengalami pemberdayaan.

2) Tingkat Akses (*access*)

Sejauhmana terjadi kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber ekonomi (tanah, tenaga kerja, kredit, pelatihan, pemasaran, pelayanan).

3) Tingkat Penyadaran (*conscientisation*)

Sejauhmana laki-laki dan perempuan sama-sama memahami bahwa perbedaan peran gender merupakan konstruksi/bentukan masyarakat, meyakini bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak terjadi dominasi politik maupun ekonomi oleh salah satu pihak (laki-laki atau perempuan). Jika terjadi kesetaraan dalam kesadaran gender ini, maka dasar yang mewadahi terwujudnya partisipasi bersama dalam proses pembangunan sudah ada.

4) Tingkat Partisipasi (*participation*)

Sejauhmana terjadi partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan administrasi; partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pengkajian kebutuhan (*needs assessment*), pengembangan proyek, pelaksanaan dan evaluasi proyek.

5) Tingkat Penguasaan (*control*)

Sejauhmana terjadi pemanfaatan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan melalui penyadaran (*conscientisation*) dan mobilisasi agar tercapai penguasaan perempuan atas sumber-sumber ekonomi dan distribusi keuntungan. Kesetaraan dalam kontrol terhadap sumber ekonomi

## **9.4 Model Gender Analysis Pathway (GAP)**

Metode GAP merupakan metode yang telah banyak dikembangkan di Indonesia terutama dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender.

### **1) Pengertian.**

Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan yang menjadi pokok bahasan, mulai dari aspek kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Metode GAP dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menetapkan program pembangunan, meningkatkan wawasan pentingnya efektifitas dan efisiensi, serta kelayakan perencanaan pembangunan yang selalu memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian metode GAP dapat digunakan oleh para perencana dan pelaksana program pembangunan ditingkat pusat dan daerah, untuk menetapkan prioritas permasalahan dan sasaran serta solusi atau intervensi yang diperlukan.

Rasionalisasi penggunaan GAP sebenarnya berawal dari :

- a. GBHN dan Proenas yang mengisyaratkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana program Pembangunan Nasional, terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
- b. Falsafah KKG pada dasarnya sudah mulai diamanatkan sejak UUD 1945, dimana tanpa membedakan warga negara, apakah laki-laki atau perempuan. Atas dasar itu kesenjangan gender harus menjadi pertimbangan untuk dihindari dan dipecahkan melalui kebijakan, perencanaan dan pernantauan.



- c. Metode GAP merupakan metode yang sudah diuji-cobakan oleh Bappenas yang ternyata dapat membantu para perencana dan pelaksana program pembangunan dalam melaksanakan amanat di atas.

### **Langkah-langkah (alur kerja analisis)**

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) adalah sebagai berikut:

#### **1) Langkah pertama:**

Melakukan analisis bias gender yang ada di wilayah garapan. Analisis bias gender ini meliputi kesenjangan dalam faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya, maupun faktor agama. Lakukan dengan matrik sebagai berikut:

#### **Matrik 1**

##### **Identifikasi Masalah Gender**

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	PENYEBAB MASALAH			KET
		FAKTOR SOSIAL BUDAYA	FAKTOR AGAMA	FAKTOR SOSIAL EKONOMI	
1	2	3	4	5	6

Identifikasi masalah bias gender dibuat untuk mempermudah pengisian bagan alur kerja analisis gender.

Petunjuk pengisian:

- Kolom 1 : Nomor pengisiannya cukup jelas
- Kolom 2 : Diisi dengan masalah-masalah bias gender yang ada disuatu wilayah, administratif, bisa ditinjau berdasarkan individu, institusi ataupun propinsi. Untuk selanjutnya diidentifikasi penyebab masalahnya.
- Kolom 3 : Faktor sosbud diisi dengan masalah sosial budaya apa yang menyebabkan Bias Gender yang telah diungkapkan di atas.  
Contoh : KB urusan perempuan.
- Kolom 4 : Faktor agama diisi dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemahaman agama yang menyebabkan bias gender yang telah diungkapkan di atas.  
Contoh : KB haram untuk laki-laki.
- Kolom 5 : Faktor sosek diisi dengan faktor-faktor/pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan sosek yang menyebabkan bias gender yang telah diungkapkan di atas.  
Contoh: laki-laki harus mencari nafkah, tidak punya waktu untuk mengetahui makna dan metode KB.
- Kolom 6 : Keterangan diisi dengan penjelasan-penjelasan penting. **Catatan:** Untuk pengisian kolom penyebab masalah (kolom 3,4,5). Kolom ini diisi tergantung dari hasil analisisnya, misalnya kalau penyebab bias gender bukan karena faktor agama, berarti kolom 4 tidak perlu diisi.

Berikut ini contoh pengisian matrik Identifikasi Masalah Gender

**Matrik 1**

**Identifikasi Masalah Gender**

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	PENYEBAB MASALAH			KET
		FAKTOR SOSIAL BUDAYA	FAKTOR AGAMA	FAKTOR SOSIAL EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	Kesetaraan dlm Prog KB bagi laki-laki sangat Rendah	-Suarni tidak pantas ikut KB -KB urusan perempuan		-Laki-laki harus mencari nafkah tidak punya wkt untuk mengetahui seluk beluk KB -Terbatasnya pilihan kontrasepsi untuk laki-laki yang murah	

**2) Langkah kedua:**

Lakukan diskusi bersama tim kerja di wilayah garapan, untuk membangun matrik analisis gender. Matrik ini merupakan langkah awal dan alur kerja analisis gender. Yang dibahas dalam matrik ini adalah kebijakan saat ini, data terpilah, faktor kesenjangan apa yang ada dalam akses, peran, kontrol atau manfaat serta isu gender apa yang menonjol.

Untuk mengungkap isu yang ada, gunakan matrik di bawah ini.

**Matrik II :**

**Analisis Gender**

Sektor/ Propinsi

Kebijakan Saat ini	Data Terpilah	Faktor Kesenjangan				Isu Gender	Ket.
		Akses	Peran	Kontrol	Manfaat		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kalau matrik ini sudah terisi, berarti kita sudah membuat langkah awal dalam kotak I alur kerja analisis gender model GAP.

**Petunjuk pengisian:**

Sektor/Propinsi: Area diisi cakupan analisis, bisa cakupan sektor atau propinsi.

Kolom 1 : Kebijakan saat ini diisi dengan kebijakan yang dibuat saat ini tentang program / kegiatan yang dilaksanakan.

Contoh: peningkatan peserta KB laki-laki.

Kolom 2 : Data terpilah diisi dengan data laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan masalah yang terungkap dalam matrik 1.

Contoh : peserta KB laki-laki 1,38 persen, peserta KB perempuan 98,62persen

- Kolom 3 : Faktor kesenjangan berdasarkan akses diisi dengan permasalahan yang terungkap dalam matrik 1, apakah kesenjangan itu mengungkapkan kesenjangan dalam hal peluang memperoleh sumber daya tertentu antara laki-laki dan perempuan.  
Contoh: pelayanan KB sebagian besar untuk perempuan.
- Kolom 4 : Faktor kesenjangan dari aspek peran, diisi dengan bagaimana tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan.  
Contoh: sedikit sekali laki-laki yang berpartisipasi dalam program KB.
- Kolom 5 : Faktor kesenjangan dari aspek kontrol diisi dengan siapa pengambil keputusan itu apakah di tangan laki-laki atau perempuan.  
Contoh: walaupun peserta KB kebanyakan perempuan tetapi pengambilan keputusan adalah di tangan laki-laki (suami)
- Kolom 6 : Manfaat diisi dengan siapa yang menikmati kegunaan sumber daya secara optimal apakah laki-laki atau perempuan. Contoh: peserta KB bermanfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan (suami dan istri).
- Kolom 7 : Isu gender diisi dengan hasil analisa dari permasalahan-permasalahan di atas, yang mengungkap isu gender yang dominan dan akan diangkat dalam penyusunan program aksi. Contoh: peran serta laki-laki (suami) dalam program KB sangat rendah.

Kolom 8 : Keterangan diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu dan penting.

Berikut disajikan aplikasi matrik Analisis Gender.

**Matrik II :**

**Analisis Gender**

Sektor/ Propinsi

Kebijakan Saat ini	Data Terpilah	Faktor Kesenjangan				Isu Gender	Ket.
		Akses	Peran	Kontrol	Manfaat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Peserta KB laki-laki perlu ditingkatkan	Sampai Akhir bln Juli 2001 : - eserta KB laki-laki 1,38 persen - Peserta KB perempuan 98,62 persen	Pelayanan KB sebagai bagian besar untuk perempuan	Kurang/ sedikit sekali laki-laki yg berpartisi pasif langsung dalam prog.KB	Walaupun peserta KB adalah perempuan tetapi pengambil keputusan adalah di tangan laki-laki		Peran serta laki-laki dlm prog.KB sangat rendah	

**3) Langkah ketiga:**

Dari matrik I dan matrik II ini kotak I dari bagan alur analisis gender, sudah dapat diisi selanjutnya ialah kotak 11 yang berupa formulasi kebijakan Gender yang baru (bila perlu diformulasi ulang) dan indikator gender secara Jelas, terukur dan dapat diaplikasikan di lapangan.

**4) Langkah keempat :**

Setelah kebijakan baru diformulasikan selanjutnya tetapkan kegiatan-kegiatan operasional yang gender responsif dengan sasaran laki-laki dan perempuan.

### **5) Langkah kelima :**

Hasil dari analisis gender model GAP ini dituangkan kedalam matrik Program Aksi yang berisi langkah-langkah atau Intervensi yang akan dilaksanakan di wilayah kerja secara lengkap.

### **Rangkuman**

Analisis gender merupakan suatu proses menganalisis informasi dan data tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya kesenjangan gender dalam program pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak pembudayaannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Analisis gender dapat memudahkan dan menemukan faktor-faktor ketidak seimbangan gender yang dilihat dari aspek- akses, peran, kontrol dan manfaat, sehingga dapat menentukan alternatif intervensi yang perlu dilakukan mulai dari formulasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan serta menentukan jenis indikator gender yang lebih tepat.

Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan dalam proses manajemen program atau dalam rangka pengarusutamaan gender kedalam program pembangunan khususnya Program KBN, dengan menggunakan alat analisa antara lain: metode Harvard, Moser, Sara Longwe, GAP, dan lain-lain.

Masing-masing metoda tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan sehingga dalam mengimplementasikan metoda analisis gender, semua pendekatan dapat saling mendukung tergantung dari kebutuhan atau aspek, atau tujuan analisis.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan pengertian tujuan dan tehnik analisis gender Harvard.
2. Jelaskan pengertian tujuan dan tehnik analisis gender Moser
3. Jelaskan pengertian tujuan dan tehnik analisis gender kerangka pemampuan perempuan (Sara H Longwe).
4. Jelaskan pengertian tujuan dan tehnik analisis gender GAP

### **Tugas Terstruktur**

Buatlah laporan hasil penerapan analisis gender berdasarkan metoda Harvard, Moser, kerangka pemampuan perempuan (Sara H Longwe), dan GAP.

### **Daftar Pustaka**

- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk.1993. Bahan Pelatihan Gender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Jakarta.
- Puspitawati, Herien. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. IPB Press. Bogor.





---

# **BAB X**

## **PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN**

---

**Tujuan Instruksional:**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip penerapan pengarusutamaan gender.
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian pengarusutamaan gender.
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tujuan dari pengarusutamaan gender.
4. Mahasiswa dapat menyebutkan sasaran pengarusutamaan gender.
5. Mahasiswa dapat menyebutkan ruang lingkup pengarusutamaan gender.
6. Mahasiswa dapat menilai kepekaan gender dan memasukkannya ke dalam kebijakan program dan kegiatan masing-masing.
7. Mahasiswa dapat memahami prosedur dan langkah-langkah pengarusutamaan gender.

## **10.1 Prinsip Penerapan PUG**

Dari uraian 3 (tiga) teori gender pada pokok bahasan di atas, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dalam mensosialisasikan PUG dan penerapannya di Indonesia mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Pluralistis

Yaitu menerima keragaman budayam agama dan adat istiadat (Pluralistis), karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat tadi merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam Pengarusutamaan gender tanpa harus mempertentangkan keragaman tersebut.

2) Bukan pendekatan konflik

Yaitu pendekatan dalam rangka PUG tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.

3) Melalui proses sosialisasi dan advokasi

Prinsip yang penting dalam PUG di Indonesia adalah melalui perjuangan dan penerpaan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi.

Dalam PUG tidak semudah membalikkan telapak tangan atau ibarat memakan “cabe”, begitu di gigit terasa pedas. Tetapi pelaksanaannya harus dengan penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

4) Menjunjung nilai HAM dan Demokratisasi

Yaitu pendekatan PUG di Indonesia tidak melalui pertentangan –pertentangan dan penekanan-penekanan sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan. PUG di Indonesia penerapannya

akan selalu menjunjung nilai-nilai Hak Azazi Manusia dan demokratis, sehingga akan di terima oleh lapisan masyarakat tanpa ada penekanan-penekanan.

## **10.2 Cakupan dan Batasan Pengarusutamaan Gender**

Untuk memahami lebih dalam tentang Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) sebaiknya kita memahami “Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan dan Program Sektoral, adalah :

- 1) Memasuki permasalahan gender dalam program pembangunan
- 2) Mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan
- 3) Suatu usaha untuk memasukkan kerangka gender ke dalam disain, pelaksanaan rencana dan program sektoral.
- 4) Pengakuan adanya suatu arus utama dimana gagasan, keputusan dan penyebaran sumber daya dilakukan melalui pencapaian tujuan pembangunan.
- 5) Bukan hanya memadukan isu gender ke dalam arus utama (mainstream), tetapi mengubah arusutama agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Dalam lampiran Instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000, dapat disimak, bahwa beberapa pengertian tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) telah disusun dan dikembangkan oleh berbagai pihak. Laporan Dewan Ekonomi PBB 1997, menyebutkan bahwa PUG adalah suatu proses penilaian implikasi dari setiap rencana aksi bagi perempuan dan laki-laki, mencakup peraturan, kebijakan-kebijakan atau program-program pada tiap-tiap bidang di semua tingkatan pembangunan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PUG sebagai suatu strategi untuk menciptakan kondisi

kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat dibuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi, yaitu :

- 1) Perencanaan; menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki
- 2) Pelaksanaan; memastikan bahwa strategi-strategi yang dijelaskan mempunyai dampak, baik pada perempuan maupun laki-laki.
- 3) Pemantauan; mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program, dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki
- 4) Penilaian; memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih baik sebagai hasil prakarsa tersebut.

### **10.3 Tujuan dan Sasaran Pengarusutamaan Gender**

Tujuan, seperti tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2000, adalah:

- 1) Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
- 2) Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

Sasaran Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) akan berhasil, jika sudah dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik yang bergabung alam lembaga pemerintah (Departemen dan Non Departemen), organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan maupun pada masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga.

Lembaga pemerintah merupakan sasaran utama dari PUG seperti tertuang dalam Inpres No.9 tahun 2000. Dengan kewenangan yang dimiliki, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia mulai tingkat pusat sampai dengan lini lapangan, yang berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan (policy maker), dan perencanaan program (technical planning) mutlak harus mengarusutamakan gender dalam setiap langkahnya. Begitu pula organisasi swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lain sebagainya, adalah organisasi-organisasi yang sangat menguasai keadaan di lapangan dan dekat dengan masyarakat. Dalam bidang kesehatan misalnya, kalau perencanaan kesehatan, pelaksanaan pelayanan, pemantauan dan penilaian sudah berwawasan gender, maka dapat dipastikan bahwa pelayanan kesehatan yang baik dapat dinikmati oleh perempuan maupun laki-laki diseluruh Indonesia.

#### **10.4 Ruang Lingkup PUG**

Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

##### **1) Perencanaan**

Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan secara rasional baik dalam tahapan membuat kebijakan maupun program, ditingkat nasional, propinsi maupun kabupaten. **Perencanaan kebijakan** merupakan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan **perencanaan program** merupakan operasionalisasi dari kewenangan pemerintah yang dilakukan pada setiap lingkup pemerintahan diberbagai tingkatan wilayah.

Pengertian program disini adalah program/proyek/kegiatan operasional yang merujuk kepada Propenas/Propeda dan Repeta/Repetada serta RAPBN/RAPBD.

Perencanaan yang responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga

pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti : peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalisasinya di lapangan.

**Perencanaan kebijakan** yang responsif gender dilakukan setiap 5 tahun sekali (kebijakan jangka menengah seperti ProPenas dan Propeda), sedangkan **perencanaan program** dilakukan setiap tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan (kebijakan jangka pendek seperti Repeta an Repetada), dan “koreksi” dapat saja dilakukan dalam kurun waktu tersebut apabila dirasa ada kekeliruan.

Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan tujuan agar tersusunnya rencana kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender diberbagai bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi, hukum, politik, agama, pendidik, social dan budaya.

Metoda Analisis Gender yang lazim dikembangkan dan telah diuji cobakan BAPPENAS dalam siklus perencanaan program pembangunan adalah metoda GAP (*Gender Analysis Pathway*). Hasil Analisis akan memberi inspirasi untuk menyusun (membuat perencanaan), program, proyek, dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Dukungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menekankan prioritas ulang pada peningkatan pengeluaran pemerintah
- b. Menekankan pada reorientasi anggaran yang semula mendanai program dan kegiatan yang netral gender menjadi anggaran yang mendanai program dan kegiatan yang responsif gender.
- c. Memfokuskan penggunaan dana yang memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan
- d. Adanya partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan penganggaran.
- e. Sesuai dengan keperluannya, anggaran dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis, strategis maupun untuk pemampuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

## **2) Pelaksanaan**

Pengarusutamaan Gender (PUG) berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan dengan mempertimbangkan aspek tersebut diatas. Apakah dalam setiap kegiatan, perempuan dan laki-laki mendapat peran, akses, manfaat dan kontrol yang sama.

Pelaksanaan PUG perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemampuan para pelaksana pengarusutamaan gender.
- b. Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian
- c. Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain :
  - Forum komunikasi
  - Kelompok kerja



- Panitia Pengarah (Steering Committee)
  - Tim Penggerak PUG (Vocal Point)
- d. Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen kesegnap jajaran pemerintah dan swasta serta disemua tingkatan, propinsi, kabupaten dan kota. Pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua stake holders dalam proses PUG.
  - e. Pembentukan Kelembagaan PUG pada instansi pemerintah disetiap tingkatan wilayah.

Mekanisme kerja instansi pemerintah dalam melaksanakan PUG :

- a. Penanggung jawab dan perumus kebijakan tentang pengarusutamaan gender dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- b. Pelaksana pengarusutamaan gender dilakukan oleh semua instansi pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah dan LSM yang peduli pada kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Penanggung jawab operasional di tingkat daerah dipegang oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro/Bagian/Seksi yang menangani program pemberdayaan perempuan di daerah
- d. Kerjasama koordinasi antara institusi dan LSM melalui kelompok kerja untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi pelaksanaan PUG guna dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden

### **3) Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang sudah disusun (direncanakan) perlu dipantau

dan dievaluasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- f. Dapat dipertanggung jawabkan
- g. Tepat waktu
- h. Sederhana, efektif dan efisien (tepat guna)
- i. Transparan, dapat dipercaya dengan data yang valid
- j. Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin
- k. Adanya indicator dan tolok ukur

Pemantauan dan evaluasi PUG mencakup pertanyaan-pertanyaan :

- a. Sejauh mana prakondisi dan komponen kunci PUG telah ada
- b. Sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber-sumber daya dan fasilitas-fasilitas serta pelayanan-pelayanan kegiatan.
- c. Sejauh mana para staf, mitra kerja dan kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki telah atau belum berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta dalam pelaksanaan program.
- d. Sejauh mana kinerja kegiatan staf telah responsive gender

## **10.5 Prosedur dan Langkah PUG**

Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak dapat diimplementasikan secara efektif, jika sebagian besar dari pembuat kebijakan di tingkat atas, yaitu mereka yang menentukan prioritas nasional dan daerah, yang menentukan agenda pembangunan, yang menentukan alokasi anggaran, pimpinan daerah, sektor/departemen masih berada “**diluar area**” pengarusutamaan gender.

Banyak pembuat kebijakan masih belum menyadari akan arti penting serta relevansi dari keseluruhan “**diskusi**” kesetaraan dan keadilan gender ke dalam lingkungan profesinya.

Dalam melaksanakan PUG beberapa hal/prosedur harus diperhatikan, yaitu: Inventarisasi pendataan para peserta pelatihan/advocator.

- 1) Melaksanakan pelatihan/advokasi untuk memberi kepekaan dan kesadaran gender bagi para pengambil kebijakan maupun praktisi pembanguna
- 2) Memahami visi, misi dan program organisasi, serta menilai kepekaan gender yang terkandung di dalamnya.
- 3) Mengembangkan strategi operasional dan program aksi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
- 4) Menyediakan pangkalan data yang akurat yang dikumpulkan dan disajikan secara terpisah menurut jenis kelamin. Data dimaksud dikumpulkan baik oleh BPS maupun oleh masing-masing sektor/departemen/lembaga, yang secara rutin diperbaharui.
- 5) Menyediakan data statistik gender yaitu data yang berkaitan dengan isu gender yang muncul karena permasalahan ketimpangan di dalam memperoleh akses, manfaat peran dan kontrol atas sumber daya pembangunan, sekaligus memahami penyebab masalah dan kesenjangan tersebut.
- 6) Menyediakan piranti analisis gender
- 7) Menyusun atau menyediakan indikator yang sensitif gender, baik yang kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka mekanisme pemantauan dan penilaian.

Berdasarkan prosedur diatas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut :

- 1) Meninjau dan menelaah kembali amanat dan pesan yang terkandung dalam berbagai kesepakatan nasional maupun internasional, misalnya PROPENAS, ICPD dan lain-lain.
- 2) Mempelajari statistik gender yang perlu ditangani dan memformulasikan cara menanganinya.
- 3) Mengidentifikasi masalah gender yang mempengaruhi program dan kegiatan
- 4) Meninjau kembali berbagai kebijakan, visi, misi dan tujuan organisasi untuk menilai :
  - a. Buta gender : tidak memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda, atau tidak menyebutkan secara eksplisit perempuan dan laki-laki.
  - b. Bias gender : Kebijakan dan program yang mementingkan laki-laki, dan sama sekali mengabaikan perempuan atau sebaliknya.
  - c. Manfaat gender : sejauhmana perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat manfaat dari program dan kegiatan tersebut.
- 5) Kalau ada bias, formulasikan kembali secara eksplisit kebijakan dan program tersebut untuk memastikan bahwa manfaat yang sama akan diperoleh laki-laki dan perempuan.
- 6) Untuk setiap pernyataan dan rencana kebijakan, tunjukkan kegiatan utama yang harus dilakukan agar tercapai tujuan kebijakan. Tugas-tugas, peran dan tanggung jawab semua pihak harus teridentifikasi.
- 7) Paparkan advokasi kebijakan, rencana, tujuan dan kegiatan yang telah direvisi, kepada pejabat berwenang untuk memperoleh komitmen dan dukungan politik untuk membentuk Gender

vocal Points serta alokasi sumber daya bagi pelaksanaannya.

- 8) Adakan sosialisasi suatu pertemuan orientasi dengan staf yang bersangkutan untuk memberitahukan tentang kebijakan dan rencana sektoral yang direvisi.
- 9) Susun Gender Vocal Point pada setiap Departemen yang Terdiri dari wakil-wakil setiap unsure Departemen (jumlah perempuan dan Laki-laki yang seimbang) dengan mandat berikut :
  - a. Meninjau kembali kebijakan dan rencana yang direvisi
  - b. Operasionalisasi Kebijakan dan rencana
  - c. Memantau pelaksanaan rencana
  - d. Mengumpan balik penemuan-penemuan pada pejabat yang berwenang.
- 10) Menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan dan program aksi

## **10.6 Identifikasi Permasalahan Gender**

Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam pengarusutamaan gender adalah mengidentifikasi masalah gender yang mempengaruhi program dan kegiatan.

Permasalahan gender dapat ditinjau dari empat aspek, meliputi :

- 1) Sosial Budaya. Kondisi yang diciptakan atau rekayasa oleh norma atau adat istiadat yang membedakan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan. Baik kemampuan universal seperti intelektual maupun kemampuan spesifik (khusus) yang berkaitan dengan aspek fisik biologis.
- 2) Agama. Penafsiran yang berbeda atau pemahaman yang kurang lengkap terhadap dalil agama akan mewarnai serta mempengaruhi persepsi, sikap

dan perilaku manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan agar mencapai suasana yang harmonis, damai dan sejahtera.

Agama mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya maupun mengatur hubungan horisontal antara sesamanya

- 3) Ekonomi. Adanya anggapan bahwa perempuan dengan bentuk dan keterbatasan fisik biologis ikut dikondisikan sebagai makhluk yang kurang produktif dalam bidang ekonomi, sedangkan laki-laki dikondisikan sebagai unsur pencari nafkah yang lebih produktif. Sehubungan dengan itu laki-laki memperoleh kesempatan untuk berperan dalam berbagai sumber pembangunan. Di Indonesia dalam rumah tangga perempuan dipolakan sebagai unsur pengatur/pengguna penghasilan suami (laki-laki), dengan pembagian tugas antara yang menghasilkan (suami/laki-laki) dan mengatur pengeluaran (isteri/perempuan).
- 4) Peraturan Perundang-undangan. Secara hukum menurut UUD 1945 laki-laki dan perempuan sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan dan membela negara. Namun bila diamati secara teliti dan cermat dari ketentuan dasar tersebut masih dirasakan adanya perbedaan (diskriminasi) terhadap kaum perempuan dalam berbagai hal, antara lain dalam kesempatan pendidikan, perlakuan dan penggajian ditempat kerja, perlindungan terhadap tindak kekerasan termasuk hak-hak reproduksinya.

## **Rangkuman**

Pengarusutamaan gender (PUG) pada hakekatnya adalah suatu strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi kesetaraan dan keadilan gender

Strategi ini ditempuh melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan-permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pembangunan. Diharapkan PUG mampu menegakkan Hak-hak perempuan dan laki-laki atas pengakuan, peluang dan penghargaan yang sama dimasyarakat, sehingga kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek dapat diperkecil atau dihilangkan.

Untuk mendukung pelaksanaan PUG, telah dikeluarkan INPRES No. 9 tahun 2000 sebagai landasan legal terutama bagi lembaga pemerintah disetiap tingkatan.

Dalam pelaksanaan PUG perlu diperhatikan sasaran, mekanisme/pedoman dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Sebelum pelaksanaan PUG, perlu dilakukan analisis gender untuk mengetahui masalah kesenjangan gender yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya.

### **Soal Latihan**

1. Jelaskan prinsip penerapan pengarusutamaan gender di Indonesia
2. Jelaskan tentang latar belakang dan pengertian pengarusutamaan gender.
3. Jelaskan tujuan dari pengarusutamaan gender.
4. Sebutkan ruang lingkup pengarusutamaan gender dan jelaskan mengenai perencanaan yang responsif gender.
5. Jelaskan prosedur dan langkah-langkah pengarusutamaan gender

### **Tugas Terstruktur**

Susunlah langkah-langkah pengarusutamaan gender dalam bidang penyuluhan pertanian.

### **Daftar Pustaka**

Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.  
2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender  
Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.

Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.  
2001. Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan  
Gender di Indonesia. UNFPA. Jakarta.





---

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Adinda Van Hemelrijk. 2001. *Gender Toolkit Volume I*, Denpasar: VECO-RI.
- Allard, Andrea; Cooper, Maxine; Hildebrand, Gaell; Wealands, Eileen. 1995. *Stages: Steps Towards Addressing Gender in Educational Settings*, Curriculum Corporation, Victoria, Australia.
- Ariningsih E, Rachman HPS. 2008. Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* 6(3): 239-255. DOI: [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com\\_content&task=view&id=537&Itemid=60](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=60)
- Darahim Andarus. 2000. *Kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat: Tinjauan Social Budaya dan Agama*. BKKBN, Jakarta.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Forum Komunikasi LSM. 1997. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian*. Aus-Aid dan Ford Foundation. Jakarta.
- Hayati. 2014. *Participation of Female Farmers in Achieving Household Food Security*. *Asian Journal of Agricultural and Food Sciences (AJAFS)*, Vol.2, No. 6. ISSN: 2321 – 1571. Asian Online Journals ([www.ajouronline.com](http://www.ajouronline.com))

- Hayati. 2016. Peran Gender dan Penyuluhan dalam Adaptasi Perubahan Iklim Di Kawasan Das Renggung Kabupaten Lombok Tengah
- Hubeis. Aida Vitayala. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press. Bogor.
- Hubeis AV. 2012. Relasi Gender dan Ketahanan Pangan. Di dalam: Merevolusi Revolusi Hijau. Pemikiran Guru Besar IPB. Bogor (ID): IPB Press.
- Ibnouf FO. 2009. The role of women in providing and improving household food security in Sudan: Implication for reducing hunger and malnutrition. *Journal of International Women's Studies* 10(4) [Internet]. [diunduh 21 Maret 2012]. Tersedia pada: [www.bridgew.edu/.../SudanFoodSecurity.pdf](http://www.bridgew.edu/.../SudanFoodSecurity.pdf) .
- Ihromi, TO. 1995. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001. Materi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi. UNFPA. Jakarta.
- Kantor Kementerian Negara Pemberd ayaan Perempuan. 2001. Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia. UNFPA. Jakarta.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Notosusanto, Smita dan Poerwandari, E Kristi. 1997. Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Bekerja sama dengan harian Kompas dan Penerbit Obor. Jakarta.
- NTTPEP-AusAID. 2007. Panduan Pelatihan Keadilan Gender. NTTPEP Kabupaten Ende. Ende NTT
- Puspitawati, Herien. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. IPB Press. Bogor.

- Sajogyo, Pudjiwati, dkk. 2010. Pemberdayaan Perempuan Pedesaan: Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB. Bogor.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. 1997. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Setiawan I. 2012. Dinamika Pemberdayaan Petani: Sebuah Refleksi dan Generalisasi di Jawa Barat. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Smithyman, Patricia. 2002. Gender Equity. Primary and Secondary Teacher Education Project Australian Agency for International Development (AusAID) GRM International.
- Sumardjo. 2012. Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian. Di dalam Merevolusi Revolusi Hijau. Pemikiran Guru Besar IPB. Bogor: IPB Press.
- Suryadi, Ace. 2004. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Genesindo. Jakarta.
- Tim Teknis Pokja Peran Serta Masyarakat. 2000. Materi Pokok Penyadaran Gender. Jakarta : Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought. Westview Press. Oxford.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk. 1993. Bahan Pelatihan Gender dan Pembangunan. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Jakarta.
- Victorian Directorate of School Education. 1995. Early Moves: Primary Gender Inclusive Cur Puspitawati, Herien. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. IPB Press. Bogor.
- Wallce, Tina dan March, Candida. 1991. Changing Perception. Oxfam. Oxford.

